

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN
INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DI UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Oleh:
Kharisma Candraning Pangastuti
NIM: 214105030044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN
INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DI UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:
Kharisma Candraning Pangastuti
NIM: 214105030044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN
INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DI UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN
INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DI UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekertaris

Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun Wildan Khisbullah Suhma, M.Akun
NIP. 197506052011011002 NIP. 199507072025211080

Anggota:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Dr. Retna Anggitaningrih, S.E., M.M. CRMP.
2. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.

(*M. Hidayatullah*)

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةِ إِلَى أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ۚ ﴾⁵⁸

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An Nisa’: 58).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Qur'an Kemenag, *Surah An Nisa' Ayat 58*, diakses 24 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

PERSEMBAHAN

Puji syukur dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan segala puji hanya miliknya, Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan bahagia sebagai rasa syukur maka skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Tohari dan Ibu Dinik Supiati yang selalu senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir sehingga skripsi ini dapat dibuat dan terselesaikan.
2. Adik saya Muhamad Mahardika Ramadhan yang selalu memberi dorongan semangat untuk selalu berusaha dan selalu mendoakan kesuksesan saya.
3. Sahabat saya Muhammd Tegar Alaudin, Faizzatul Lailiyah, Dila Ayu Lestari, Nadhilah Dinan Lailyna Al-Badri, Siti Nur Mujaynah, Siti Lailatul Maulida, Maria Ulfa, dan Aulya Rahmawati yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya serta selalu menemani dari awal pengajuan judul hingga sampai saat ini.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah khususnya teman-teman kelas AKS 5 angkatan 2021 yang selalu memberikan masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi saya.
5. Seluruh pihak petugas UPT PPD Jember yang telah memberikan data sekaligus memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenui tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna dan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya selama proses penulisan skripsi.
7. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Dr. Sofiah, M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari tahun 2021 hingga sekarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Bapak Ismawan Taramurti, S.H., M.M selaku Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
11. Seluruh Petugas dan Staf yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis juga menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun semangat serta motivasi, dan diharapkan pembaca juga dapat menikmati proses pembuatannya dari awal hingga pada tahap akhir.

Jember, 6 November 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Kharisma Candraning Pangastuti, M.F. Hidayatullah, 2025: Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Pajak Air Permukaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di berbagai daerah, realisasi penerimaan PAP sering kali belum mencapai target akibat lemahnya sistem informasi dan pengendalian internal. Namun, fenomena berbeda terjadi di Kabupaten Jember, di mana realisasi penerimaan PAP oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember secara konsisten melampaui target setiap tahunnya. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan pengendalian internal yang diterapkan pada instansi tersebut.

Fokus penelitian ini mencakup dua hal, yaitu: 1) Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember? dan 2) Bagaimana penerapan pengendalian internal di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember untuk mendukung Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengendalian internal di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember untuk mendukung Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui: 1) Observasi, 2) Wawancara mendalam dengan pihak UPT PPD Jember, serta 3) Dokumentasi berbagai dokumen pendukung. Keabsahan data disini menggunakan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di UPT PPD Jember telah berjalan efektif melalui penggunaan aplikasi Pajak Air Permukaan berbasis digital yang mendukung kecepatan, keakuratan, dan transparansi proses pemungutan pajak. Selain itu, 2) Penerapan pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, prosedur pengendalian, penilaian risiko, pengawasan, serta sistem informasi dan komunikasi telah terlaksana dengan baik dan berperan penting dalam menjaga akuntabilitas serta keandalan data keuangan. Kombinasi keduanya berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan UPT PPD Jember dalam mencapai dan melampaui target penerimaan Pajak Air Permukaan setiap tahun.

DAFTAR ISI

Hal.

Halaman Sampul i

Lembar Persetujuan Pembimbing ii

Lembar Pengesahan iii

Motto iv

Persembahan v

Kata Pengantar vi

Abstrak ix

Daftar Isi x

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

J E M B E R

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	49
C. Pembahasan Temuan J.E.M.B.E.R.....	91
BAB V PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran-saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
Tabel 1.1 Data Terget dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Permukaan Kabupaten Jember Tahun 2019-2023.....	3
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
Gambar 4.1 Instagram UPT PPD Jember	49
Gambar 4.2 Facebook UPT PPD Jember	49
Gambar 4.3 Surat Ketetapan Pajak Daerah	52
Gambar 4.4 Bukti Pembayaran	53
Gambar 4.5 Tanda Bukti Penerimaan	54
Gambar 4.6 Rekening Koran	55
Gambar 4.7 Aplikasi Pajak Air Permukaan	58
Gambar 4.8 Struktur Organisasi UPT PPD Jember	66
Gambar 4.9 Flowchart Pendaftaran Wajib Pajak	68
Gambar 4.10 Flowchart Penetapan Pajak	73
Gambar 4.11 Flowchart Pembayaran Pajak Air Permukaan	76
Gambar 4.12 Sosialisasi <i>Offline</i>	91
Gambar 4.13 Sosialisasi <i>Online</i>	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.² Di tingkat daerah, keberadaan pajak daerah sangat menentukan kapasitas fiskal pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi besar namun masih belum tergarap maksimal di banyak daerah adalah Pajak Air Permukaan (PAP).

PAP dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial.³ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, air permukaan mencakup semua air yang terdapat pada permukaan tanah, seperti sungai, danau, dan mata air, yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk oleh perusahaan pengolahan air, industri, dan usaha lainnya.⁴

² Andi Rahman dkk., “Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Surabaya Barat Dengan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* Vol. 3, no. 1 (2025): 19–20, <https://dx.doi.org/10.61930/jurnaladm>.

³ Nur Ika Mauliyah dkk., “Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan Melalui Sosialisasi Perpajakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan* Vol. 2, no. 2 (2024): 43.

⁴ Klikpajak, *Pajak Air Permukaan Bagi Perusahaan: Pengertian, Tarif, dan Perhitungan*, diakses 5 Mei 2025, <https://klikpajak.id/blog/pajak-air-permukaan-bagi-perusahaan>.

Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.⁵ Pada pelaksanaannya, objek Pajak Air Permukaan (PAP) tidak hanya dikenakan pada perusahaan besar atau industri pengolahan air, tetapi juga mencakup pemanfaatan air oleh berbagai fasilitas, baik milik publik maupun swasta, yang menggunakan sumber air alami seperti sungai atau mata air. Beberapa contoh objek PAP meliputi kolam renang pribadi atau komersial yang mengambil air dari sumber selain sumur bor, serta sistem distribusi air desa yang menyalurkan air dari mata air ke rumah-rumah penduduk melalui jaringan pipa, di mana nantinya air sumber tersebut ditampung terlebih dahulu untuk penghitungan debit air yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan air permukaan oleh perorangan maupun badan tetap memiliki kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

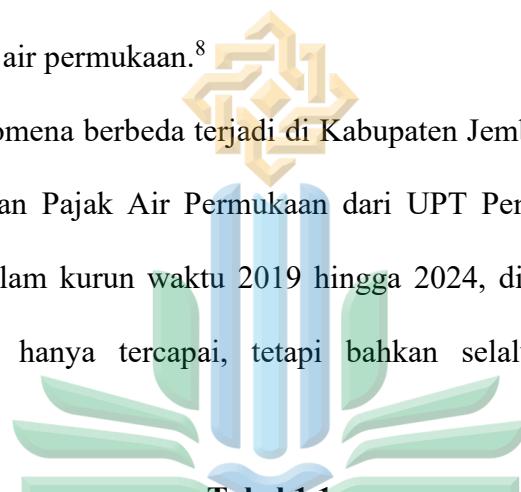
Secara nasional, realisasi penerimaan dari PAP cenderung menghadapi berbagai kendala. Banyak daerah masih belum mampu mengoptimalkan potensi PAP akibat lemahnya sistem administrasi, kurangnya sosialisasi, hingga rendahnya kepatuhan wajib pajak. Di sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau, kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, bahkan tidak mencapai 2% dari total PAD.⁶ Kondisi serupa juga terjadi di BPPRD Sumatera Utara, di mana tingkat realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren penurunan setiap tahun, hingga hanya mencapai 62% pada tahun 2021. Permasalahan ini semakin

⁵ Peraturan Gubernur Jawa Timur, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 33.

⁶ Dwinita Rahmiyati, “Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau” (Skripsi, STIE Tanjungpinang, 2022), 10.

diperburuk oleh rendahnya pemanfaatan teknologi informasi serta lemahnya sistem pengendalian internal di instansi pemungut pajak daerah.⁷ Hal yang sama juga dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang, yang mencatat penurunan realisasi pajak dari 80,49% pada tahun 2019 menjadi 57,22% pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Bappeda kepada perusahaan atau wajib pajak terkait ketentuan dan sanksi dalam pemungutan pajak air permukaan.⁸

Namun, fenomena berbeda terjadi di Kabupaten Jember. Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, diketahui bahwa target penerimaan tidak hanya tercapai, tetapi bahkan selalu terlampaui secara signifikan.



Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Permukaan Kabupaten Jember Tahun 2019-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2019	428.000.000	591.203.550	138,13%
2020	450.000.000	545.694.900	121,27%
2021	458.000.000	566.963.200	123,79%
2022	425.000.000	843.533.850	198,48%
2023	500.000.000	801.464.250	160,29%
2024	640.000.000	903.395.300	141,16%

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Di Kabupaten Jember, pengelolaan dan penagihan Pajak Air Permukaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan

⁷ Akbar Syamil Ramadhan dan Juliana Nasution, “Efektifitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi* Vol. 11, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v1i1.55196>.

⁸ Wulan Saputri Listiani dkk., “Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BAPENDA Cikokol Tahun 2019-2021,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 2, no. 5 (2022): 564–565.

Daerah. Berdasarkan data pada tabel 1.1, realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, dari target sebesar Rp428.000.000, realisasi penerimaan mencapai Rp591.203.550 dengan persentase 138,13%. Tren ini terus meningkat, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022, yaitu Rp843.533.850 dari target Rp425.000.000 dengan persentase 198,48%. Pada tahun 2024, realisasinya juga menunjukkan hasil signifikan sebesar Rp903.395.300 dari target Rp640.000.000 dengan persentase 141,16%.



Fenomena ini sangat menarik karena pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember memiliki realisasi yang selalu melebihi target secara signifikan walaupun ada kenaikan target pajak setiap tahunnya. Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan penting, apa faktor utama yang membuat kinerja pemungutan pajaknya begitu optimal dan konsisten melebihi target? Dugaan awal menunjukkan bahwa dua faktor utama yang berkontribusi besar dalam efektivitas tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan transaksi perpajakan secara lebih cepat dan akurat. Serta pengendalian internal yang kuat, baik dari sisi struktur organisasi, SOP (*standard operating procedure*), maupun pengawasan lapangan terhadap para wajib pajak.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital, pengelolaan perpajakan menuntut efisiensi yang tinggi serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

(SIA) dalam proses penyusunan menjadi lebih optimal. SIA yang terintegrasi mampu mendukung proses pengumpulan pajak secara lebih cepat, akurat, serta mengurangi *human error*,⁹ sehingga mendorong peningkatan penerimaan pajak yang lebih optimal.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penggunaan SIA terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Seperti yang dilakukan oleh Zulfi Karman dalam penelitiannya di Provinsi Jambi, membuktikan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis web mampu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi kerja pemungut pajak.¹⁰ Demikian pula, penelitian oleh Azzah Oktapania yang menyoroti hubungan antara sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Azzah menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.¹¹ Temuan ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara SIA dan sistem pengendalian internal berkontribusi besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

⁹ Wiwik Kharisma dkk., “Implementasi Aplikasi ‘SAKTI’ Sebagai Sistem Informasi Akuntansi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi,” *Jurnal Penelitian Nusantara* Vol. 1, no. 2 (2025): 65, <https://doi.org/10.59435/menuis.v1i2.20>.

¹⁰ Zulfi Karman, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Berbasis Web,” *Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer* Vol. 4, no. 3 (2023): 1860–68, <https://doi.org/10.30865/klik.v4i3.1443>.

¹¹ Azzah Oktapania dan Feby Tri Falia, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi* Vol. 04, no. 01 (2024): 23–33, <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika>.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi ilmiah dan praktis yang tinggi. Dari sisi ilmiah, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Air Permukaan. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang realisasi pemungutan pajaknya masih rendah, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan strategi pemungutan pajak berbasis sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang lebih efektif guna meningkatkan optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember?
2. Bagaimana penerapan pengendalian internal di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember untuk mendukung Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengendalian internal di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember untuk mendukung Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan sebagai bentuk kontribusi peneliti setelah penelitian diselesaikan, yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi wajib pajak, pemungut pajak, serta pemerintah daerah.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam hal pengelolaan dan optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) melalui penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai efektivitas teknologi informasi dalam mendukung sistem perpajakan daerah, serta memperluas pemahaman akademik mengenai peran pengendalian internal dalam mencegah kebocoran pajak dan meningkatkan transparansi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberi masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Air Permukaan melalui optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi dan penguatan pengendalian internal. Serta membantu dalam evaluasi kinerja sistem yang sedang berjalan untuk kemudian dioptimalkan atau diperbaiki.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai manfaat dan kemudahan sistem informasi dalam proses perpajakan yang transparan dan akuntabel.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi empirik yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian dan pengajaran, khususnya di bidang akuntansi sektor publik, perpajakan, dan sistem informasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar referensi bagi studi-studi lanjutan yang ingin mengembangkan strategi kebijakan fiskal berbasis teknologi dan tata kelola yang baik dalam konteks perpajakan daerah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola informasi keuangan dan akuntansi.¹²

2. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.¹³

3. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berada di permukaan tanah, tidak termasuk air hujan yang ditampung atau air dari sistem irigasi.¹⁴

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang dikumpulkan menurut aturan yang berlaku diregional tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

5. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah unit pelaksana teknis dari Badan Pendapatan Daerah yang menjalankan fungsi teknis pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah.¹⁶

¹² Anak Agung Gede Bagus Ariana dkk., *Sistem Informasi Akuntansi: Pengantar & Penerapan SIA Berbagai Sektor* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 4–5.

¹³ Kusuma Indawati Halim, *Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Terhadap Proses Bisnis* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 60.

¹⁴ Peraturan Gubernur Jawa Timur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 33.

¹⁵ Nur Ika Mauliyah dkk., “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 1, no. 1 (2023): 99, <http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/109>.

Berdasarkan pemahaman peneliti, sistem informasi akuntansi merupakan suatu mekanisme yang berbasis prosedur dan teknologi informasi yang digunakan oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan data keuangan secara akurat terkait pemungutan pajak air permukaan. Pajak air permukaan dalam hal ini dipahami sebagai pungutan atas pemanfaatan air yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutan pajak dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penetapan hingga pelaporan, yang dijalankan oleh UPT sebagai unit pelaksana teknis yang berperan penting dalam mengelola serta mencatat transaksi pajak dengan dukungan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga pembahasan dari setiap bab membentuk alur yang utuh dan berkesinambungan. Penyusunan ini bertujuan agar rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat dijawab secara jelas, terarah, dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut.

Bab I berisi bagian pendahuluan, yang memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian pustaka, yang mencakup dua bagian utama, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Bagian penelitian terdahulu menguraikan

¹⁶ Peraturan Bupati Jember, Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Bapenda, pasal 4.

hasil penelitian yang relevan dengan topik ini, sedangkan kajian teori menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dan acuan dalam penelitian sesuai dengan fokus yang ditetapkan.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan analisis data, yang meliputi gambaran umum objek penelitian, hasil temuan di lapangan, serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan.

Bab V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memaparkan sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusunnya dalam bentuk ringkasan, baik dari penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat originalitas serta perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁷ Terkait dengan penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai:

1. Anna dan Lisnawaty, “Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Keuangan Berbasis Web Pada CV. Damar Abadi”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dan menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka untuk teknik pengumpulan data. Penelitian ini berhasil menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat Meningkatkan transparansi dan mempermudah akses data keuangan oleh pihak CV. Damar Abadi.¹⁸
2. Azzah Oktapania dan Feby Tri Falia, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Dan Sistem Pengendalian Internal (Spi) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 40.

¹⁸ Anna dan Lisnawaty, “Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Keuangan Berbasis Web Pada CV. Damar Abadi,” *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi* Vol. 5, no. 1 (2024): 67–78, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/justian>.

jenis analisis asosiatif kausal yang teknik analisis datanya menggunakan Uji T, Uji F, Uji R^2 , regresi linier berganda, uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikansi $0,033 < 0,05$ dan SPI juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$.¹⁹

3. Eric Ignatius Taroreh, Treesje Runtu, Syermi S.E Mintalangi, “Analisis Pengenaan Tarif dan Perhitungan Pajak Air Permukaan pada Wajib Pajak Berdasarkan Perda Sulut Nomor 5 Tahun 2018”. Metode ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini menggunakan jenis observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Pengenaan tarif pajak air permukaan di wilayah Manado, Minahasa, Bitung, dan Tomohon sebagian besar telah sesuai dengan Perda Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018, Namun, terdapat ketidaksesuaian perhitungan di wilayah Bitung, khususnya pada PDAM Duasudara Kota Bitung, karena kesalahan dalam penggunaan tarif dan metode perhitungan oleh UPTD.²⁰
4. Zulfi Karman, Chandy Ophelia S, Siska Nurul Marwiyah, Suyanti, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Berbasis Web”. Metode

¹⁹ Azzah, “Pengaruh Sistem”, 23-33.

²⁰ Eric Ignatius Taroreh dkk., “Analisis Pengenaan Tarif dan Perhitungan Pajak Air Permukaan Pada Wajib Pajak Berdasarkan Perda Sulut Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara),” *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* Vol. 2, no. 2 (2024): 414–20, <https://doi.org/10.58784/rapi.219>.

penelitian ini menggunakan Rekayasa Perangkat Lunak dengan pendekatan jenis studi kasus. Subjek yang digunakan peneliti yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Teknik pengumpulan data ini ada wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian Sistem mampu mencatat data perusahaan, data pembayaran, mencetak laporan, serta meminimalkan human error dan mempercepat proses pelaporan, sebuah prototype sistem informasi berbasis web untuk mengelola pembayaran pajak air permukaan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.²¹

5. Zesa Riani, “Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung”. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) yang diterapkan di UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini adalah Prosedur pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) di UPTD Wilayah I-Bapenda Provinsi Lampung telah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 25 Tahun 2018.²²
6. Aini Alwi, Hendrik Gamaliel, dan Sintje Rondonuwu, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan pada CV Aneka Ritelindo Manado.” bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada siklus pendapatan

²¹ Zulfi, “Analisis dan Perancangan”, 1860-1868.

²² Zesa Riani, “Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) Pada UPTD Wilayah 1 BAPENDA Provinsi Lampung” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), 24-25.

serta kendala yang dihadapi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi mencakup empat aktivitas utama, yaitu order penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas yang didukung dokumen elektronik seperti E-invoice dan bukti transfer. Pengendalian internal diterapkan melalui pengendalian akses, evaluasi kinerja, dan rapat rutin, namun masih terdapat kelemahan pada pemisahan tugas dan kelengkapan pencatatan akuntansi.²³

7. Dwinita Rahmiyati, “Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen dan literatur. Subjek yang digunakan yaitu subjek utamanya yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang khususnya badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Teknik pengumpulan yang digunakan studi kepustakaan, dokumentasi. Ada pula tujuan penelitian ini yaitu Untuk menilai kontribusi PAP terhadap pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dan untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan PAP. Hasil penelitian ini adalah mengalami penurunan pada tahun 2017–2020, dan mulai meningkat kembali di tahun 2021, cukup efektif dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah, kontribusi PAP terhadap Pendapatan

²³ Aini Alwi dkk., “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan Pada CV Aneka Ritelindo Manado,” *Jurnal EMBA* Vol. 11, no. 1 (2023): 281–91.

Asli Daerah tergolong rendah, hanya sekitar 0–10% dari total pendapatan daerah.²⁴

8. Ferron Tristan Kapojos, Ingriani Elim, Steven J. Tangkuman, “Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa”. Penelitian ini menggunakan metode Analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan komparatif evaluatif. Teknik pengumpulan data terdapat data sekunder dan data primer, data sekunder yaitu observasi langsung ke UPTD dan Lokasi WPAP dan wawancara dengan pegawai terkait dan data sekunder yaitu dokumen laporan pajak, data volume air dan pembayaran, undang-undang dan peraturan terkait. Tujuan penelitian yang digunakan yaitu Untuk mengevaluasi apakah perhitungan, penetapan, dan pemungutan Pajak Air Permukaan di UPTD-PPD Bapenda Minahasa seperti, sesuai dengan Peraturan Gubernur dan UU No. 28 Tahun 2009, dilakukan secara akurat dan akuntabel, meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu Perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP) dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Sulut No. 4 Tahun 2019 dan UU No. 28 Tahun 2009. Perhitungan menggunakan volume air, faktor nilai air, harga dasar air, dan tarif 10%, Penetapan pajak dilakukan melalui sistem informasi e-Pendapatan dan menggunakan

²⁴ Dwinita Rahmiyati, “Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau”, (Skripsi, STIE Tanjungpinang, 2022), 31-60.

SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang mencantumkan kode bayar wajib pajak.²⁵

9. Henny Marina Hutagalung, “Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi”. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, literatur dan jurnal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan pelaporan PAP di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, untuk menilai kesesuaian mekanisme tersebut dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan masukan terkait efektivitas sistem pelaporan pajak daerah. Hasil penelitian yang bisa didapatkan dari penelitian ini Proses pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dilakukan melalui beberapa tahap: pendaftaran wajib pajak, penetapan volume air, penerbitan SKPD, pembayaran oleh WP, hingga pelaporan penerimaan.²⁶
10. Tania Aprilia Ropah, Stanly W. Alexander, Syermi S. E. Mintalangi, “Evaluasi Penerapan Perhitungan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada PT Air Manado”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan jenis kajian evaluasi dan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan

²⁵ Ferron Tristan Kapojos dkk., “Analisi Perhitungan, Penetapan dan Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah Di Minahasa,” *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 17, no. 4 (2022): 247–58.

²⁶ Henny Marina Hutagalung, “Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi” (Skripsi, Universitas Jambi, 2021), 41–60.

dokumentasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian perhitungan, penetapan, dan pembayaran Pajak Air Permukaan yang dilakukan oleh PT Air Manado dengan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian ini PT Air Manado melakukan perhitungan sendiri berdasarkan volume air dan tarif yang sesuai Peraturan Gubernur Sulut No. 4 Tahun 2019, namun belum membulatkan nilai pajak sesuai aturan (pembulatan ke ribuan).²⁷



Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anna dan Lisnawaty (2024)	Sistem Informasi Pengelolan Laporan Keuangan Berbasis Web Pada CV. Damar Abadi	Sama-sama membahas penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi untuk pengelolaan laporan keuangan dan menggunakan pendekatan deskriptif serta fokus ke efisiensi sistem.	Penelitian meneliti perusahaan swasta dan perancangan sistem berbasis web, sedangkan Penelitian ini pada instansi pemerintah dengan fokus pemungutan pajak air permukaan.
2.	Azzah dan Feby (2024)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	Sama-sama mengkaji SIA dan pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah.	Penelitian memakai metode kuantitatif dan fokus pada pengaruh variabel terhadap laporan keuangan, sedangkan penelitian ini kualitatif deskriptif dan menitikberatkan pada implementasi sistem dan

²⁷ Tania Aprilia Ropah dkk., “Evaluasi Penerapan Perhitungan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada PT Air Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 16, no. 3 (2021): 217–26.

				pengendalian dalam pemungutan pajak air permukaan.
3.	Eric Ignatius Taroreh, Treesje Runtu, Syermi S.E Mintalangi (2024)	Analisis pengenaan tarif dan perhitungan pajak air permukaan pada wajib pajak berdasarkan Perda Sulut Nomor 5 Tahun 2018 (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)	Sama-sama meneliti pajak air permukaan dan peran Bapenda dalam pengelolaannya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Penelitian fokus pada perhitungan tarif dan kebijakan perpajakan, sedangkan penelitian ini fokus pada sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam proses pemungutan pajak.
4.	Zulfi Karman, Chandy Ophelia S, Siska Nurul Marwiyah, Suyanti (2023)	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Berbasis Web	Sama-sama membahas sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan pajak air permukaan.	Penelitian meneliti perancangan sistem berbasis web, sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan sistem yang telah berjalan dan pengendalian internalnya di UPT PPD Jember.
5.	Zesa Riani (2023)	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung	Sama-sama meneliti prosedur pemungutan pajak air permukaan pada instansi pemerintah.	Penelitian fokus pada tata cara administratif pemungutan pajak, sedangkan penelitian ini menambahkan analisis penerapan sistem informasi dan pengendalian internal dalam proses tersebut.
6.	Aini Alwi, Hendrik Gamaliel, dan Sintje Rondonuwu	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan pada	Sama-sama meneliti penerapan sistem informasi akuntansi dan	Penelitian dilakukan pada sektor swasta (perusahaan dagang), sedangkan

	(2023)	CV Aneka Ritelindo Manado	pengendalian internal dalam proses penerimaan pendapatan serta menggunakan metode kualitatif deskriptif.	penelitian ini pada sektor publik dalam konteks pemungutan pajak air permukaan di UPT PPD Jember.
7.	Dwinita Rahmiyati (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sama-sama membahas kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan daerah serta efektivitas pelaksanaannya.	Penelitian berfokus pada kontribusi dan penerimaan PAD, sedangkan penelitian ini lebih pada sistem informasi dan pengendalian internal dalam pemungutan pajak.
8.	Ferron Tristan Kapojos, Inggriani Elim, Steven J. Tangkuman (2022)	Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah di Minahasa	Sama-sama meneliti mekanisme penetapan dan pemungutan pajak air permukaan pada UPTD Bapenda.	Penelitian lebih menekankan perhitungan dan penetapan tarif, sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan sistem informasi dan pengendalian internal.
9.	Henny Marina Hutagalung (2021)	Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	Sama-sama meneliti mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak air permukaan oleh pemerintah daerah.	Penelitian berfokus pada proses pelaporan dan pelaksanaan administrasi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada sistem informasi akuntansi dan efektivitas pengendalian internal.
10.	Tania Aprilia Ropah, Stanly W. Alexander, Syermi S. E.	Evaluasi Penerapan Perhitungan, Penetapan dan	Sama-sama meneliti pelaksanaan kebijakan pajak	Penelitian meneliti pihak wajib pajak (perusahaan daerah), sedangkan

	Mintalangi (2021)	Pembayaran Pajak Air Permukaan pada PT Air Manado	air permukaan dan faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya.	penelitian ini meneliti pihak pemungut pajak dan menilai efektivitas sistem informasi serta pengendalian internalnya.
--	-------------------	---	---	---

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari sepuluh penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian membahas peranan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan dan pemungutan pajak. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif untuk menilai efektivitas sistem, keandalan data, serta peningkatan akurasi laporan keuangan.

Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam konteks pemungutan Pajak Air Permukaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menggabungkan dua aspek tersebut di lingkungan instansi pemerintah daerah, yaitu pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem informasi dan pengendalian internal berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemungutan pajak daerah.

B. Kajian Teori

Berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang

hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.²⁸ Studi literatur yang baik merupakan ringkasan tertulis yang diambil dari artikel jurnal, buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang berisi informasi masa lalu atau sekarang yang terkait dengan topik penelitian.²⁹

1. Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan kumpulan unsur-unsur atau komponen yang saling terintegrasi dan bekerja sama dalam mencapai satu tujuan yaitu mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan. Informasi keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas dan sebaliknya jika Sistem Informasi Akuntansi tidak berkualitas maka akan menghasilkan informasi yang juga tidak berkualitas.³⁰

Menurut Tuovila SIA adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. SIA biasanya terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, database, dan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan.³¹

Sedangkan menurut Kusuma Indarwati sistem informasi akuntansi adalah kumpulan data yang sudah melalui pemrosesan sehingga

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 78.

³⁰ Aulia Septiana dkk., "SIA : Implementasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pajak Daerah," *Journal of Sustainability and Science Economics* Vol. 2, no. 1 (2024): 30, <https://doi.org/10.62337/jsse.v2i1.16>.

³¹ Anak Agung dkk., *Sistem Informasi*, 34.

menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk membantu kegiatan organisasi berjalan lebih cepat dan efisien dengan melakukan pemrosesan secara otomatis terhadap aktivitas transaksinya.³²

b. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari basis data, perangkat lunak akuntansi, perangkat keras, dan prosedur akuntansi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan organisasi. Beberapa komponen penting dari SIA antara lain:

1) Basis Data

SIA membutuhkan basis data yang besar untuk menyimpan data keuangan organisasi. Basis data ini terdiri dari informasi tentang transaksi keuangan, laporan keuangan, dan informasi keuangan lainnya. Menurut Tuovila yang menyatakan bahwa basis data merupakan komponen utama dalam sistem informasi akuntansi yang berfungsi menyimpan data transaksi secara terstruktur dan dapat diolah menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan.³³ Sedangkan menurut Kusuma Indarwati menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang dilengkapi basis data memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara efisien,

³² Kusuma, *Sistem Informasi*, 3.

³³ Anak Agung dkk., *Sistem Informasi*, 103.

mengurangi risiko kehilangan informasi, serta meningkatkan kecepatan proses pelaporan keuangan.³⁴

2) Perangkat Lunak Akuntansi

SIA menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memudahkan pencatatan transaksi keuangan dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan. Perangkat lunak ini bisa berupa program akuntansi, program pengolahan basis data, dan lain sebagainya. Menurut Kusuma Indarwati, bahwa perangkat lunak akuntansi merupakan komponen penting dalam sistem informasi akuntansi yang berperan untuk mengotomatisasi pengolahan data, mempercepat proses pencatatan, serta mengurangi potensi kesalahan manusia (*human error*) dalam pelaporan keuangan.³⁵ Sementara menurut Mulyadi, perangkat lunak dalam sistem akuntansi juga menjadi sarana untuk mendukung fungsi pengendalian dan pelaporan keuangan melalui integrasi data transaksi secara elektronik.³⁶

3) Perangkat Keras

SIA memerlukan perangkat keras seperti komputer, printer, dan scanner untuk membantu pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan. Menurut Tuovila yang menyebutkan bahwa perangkat keras merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi akuntansi karena berfungsi sebagai media penginput, pemroses, dan

³⁴ Kusuma Indawati, *Sistem Informasi*, 94.

³⁵ Kusuma, 45.

³⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 23.

pencetak informasi keuangan yang dibutuhkan organisasi.³⁷ Sedangkan menurut Kusuma Indarwati menjelaskan bahwa perangkat keras membantu mempercepat proses akuntansi dan mendukung keakuratan data dengan mengintegrasikan fungsi pencatatan dan pelaporan secara elektronik.³⁸

4) Prosedur Akuntansi

SIA juga membutuhkan prosedur akuntansi yang jelas dan terstruktur untuk memudahkan pengolahan informasi keuangan dan memastikan konsistensi dalam pengolahan informasi keuangan. Prosedur ini biasanya mencakup cara penggunaan sistem informasi akuntansi, pemeliharaan sistem dan lain sebagainya.³⁹ Menurut Mulyadi yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰ Sedangkan menurut Kusuma Indarwati menjelaskan bahwa keberadaan prosedur akuntansi yang jelas dan terdokumentasi membantu organisasi dalam mengontrol arus data keuangan serta menjaga keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi.⁴¹

³⁷ Anak Agung, *Sistem Informasi Akuntansi*, 104.

³⁸ Kusuma Indawati, *Sistem Informasi*, 95.

³⁹ Anak Agung Gede Bagus Ariana dkk., *Sistem Informasi Akuntansi: Pengantar & Penerapan SIA Berbagai Sektor* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 5.

⁴⁰ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 5.

⁴¹ Kusuma Indawati, *Sistem Informasi*, 99.

c. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Manfaat utama SIA menurut Akhter adalah memberikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. SIA memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat tentang arah bisnis mereka. Dengan informasi keuangan yang akurat dan relevan, manajemen dapat memprediksi pendapatan dan biaya, mengukur kinerja keuangan, dan memonitor arus kas. Menurut Hall, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam mengelola keuangan mereka. Beberapa manfaat dari SIA adalah sebagai berikut:

- 1) SIA dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan informasi keuangan, seperti pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan.
- 2) Dengan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan organisasi.
- 3) SIA dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan informasi keuangan.
- 4) SIA dapat membantu organisasi dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk keperluan pelaporan dan pengambilan keputusan.
- 5) SIA dapat membantu organisasi dalam pelacakan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat.

Namun, SIA juga memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya pengembangan yang tinggi, risiko keamanan data, dan masalah pemahaman teknologi bagi karyawan. Oleh karena itu, organisasi harus mempertimbangkan keuntungan dan risiko dalam mengimplementasikan SIA.⁴²

2. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses, melibatkan seluruh anggota organisasi, dan memiliki tujuan utama yaitu efektivitas, efisiensi operasional, kehandalan laporan keuangan, dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Artinya, dengan adanya pengendalian internal maka diharapkan perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien, penyajian informasi dapat diyakini kebenarannya dan semua pihak akan mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ada dengan dipatuhiinya peraturan dan kebijakan maka penyimpangan dapat dihindari.⁴³

Struktur pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan tingkat jaminan yang masuk akal bahwa tujuan spesifik organisasi akan tercapai. Pengendalian internal juga merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong

⁴² Anak Agung, *Sistem Informasi*, 6.

⁴³ Novita Kalumata dkk., “Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Malalayang Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 12, no. 2 (2017): 1205, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18650.2017>.

dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Mulyadi menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi, metode dan berbagai ukuran yang dikoordinasikan untuk bisa menjaga harta kekayaan perusahaan, memeriksa ketelitian dan juga keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan juga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen perusahaan.⁴⁵

b. Tujuan Pengendalian Internal dalam Pemungutan Pajak

Tujuan pengendalian internal dalam pemungutan pajak adalah untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur, menghindari penyimpangan, serta meningkatkan akurasi dan keandalan data pajak. Sistem ini mencakup struktur organisasi yang terkoordinasi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta prosedur evaluasi dan pelaporan yang sistematis. Dalam konteks pemungutan pajak hotel di Minahasa Selatan, pengendalian internal berfungsi untuk menjaga ketertiban administrasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Prosedur mulai dari pendataan hingga penyetoran pajak harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir dan penerimaan daerah meningkat secara optimal.⁴⁶

⁴⁴ Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akuntansi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), 60.

⁴⁵ Eni Endaryati, *Sistem Informasi*, 61.

⁴⁶ Megawati Sherlina Rumondor dkk., “Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel Untuk Pengendalian Intern di Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol. 8, no. 3 (2024): 490–498.

Efektivitas sistem pengendalian internal sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak daerah, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Studi mereka di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal, seperti kurangnya pemisahan tugas, tidak optimalnya pemantauan, serta lemahnya sistem informasi dan komunikasi mengakibatkan rendahnya rasio efektivitas pengendalian yang hanya mencapai 57,24%. Hal ini berarti bahwa pengendalian internal belum mampu secara maksimal mendukung tujuan pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan kata lain, pengendalian internal yang lemah tidak hanya membuka peluang terjadinya penyimpangan, tetapi juga menghambat pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁴⁷

c. Manfaat Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas operasional suatu organisasi. Melalui penerapan pengendalian internal yang baik, instansi dapat meminimalkan risiko penyimpangan, memastikan keandalan informasi keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dengan demikian, pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun manfaat pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

⁴⁷ Marthen Luther Rumboirus dan Darius Sabon Rain, "Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Mimika," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 6 (2024): 622–636.

- 1) Menjaga aset perusahaan, sistem pengendalian internal dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan dan kerugian.
- 2) Menjamin keandalan informasi akuntansi, SPI membantu memastikan bahwa laporan keuangan dan data akuntansi yang dihasilkan akurat
- 3) Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, pengendalian internal meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional.
- 4) Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, SPI memastikan bahwa seluruh bagian organisasi bekerja sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan manajemen.⁴⁸

d. Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. *Committee of sponsoring organizations of the treatway commission* (COSO) mengidentifikasi lima komponen pengendalian intern yang meliputi:

1) Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Merupakan susunan dari standar,

⁴⁸ Arens, Alvin A., et al., *Auditing dan Jasa Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 279.

proses dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Menurut Mulyadi menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian yang baik dapat membentuk perilaku karyawan yang patuh terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, serta menjadi dasar dalam menciptakan sistem informasi akuntansi yang efektif.⁴⁹

2) Penilaian Risiko (*risk assesment*)

Penilaian risiko adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal ataupun eksternal. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalkan. penilaian risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.⁵⁰

Sementara menurut Mulyadi, penilaian risiko yang dilakukan secara berkala membantu manajemen dalam mengambil keputusan preventif guna meminimalkan potensi kesalahan dan kecurangan dalam proses akuntansi.⁵¹

⁴⁹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 180.

⁵⁰ Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akuntansi*, 86.

⁵¹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 181.

3) Prosedur Pengendalian (*control procedure*)

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan aktivitas yang dirancang untuk memastikan perintah manajemen dilaksanakan dengan tepat serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan.

Prosedur pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.⁵² Sedangkan menurut Mulyadi, pengendalian akuntansi yang efektif melibatkan sistem otorisasi, pemisahan fungsi, dan dokumen pendukung yang memadai sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan.⁵³

4) Pengawasan (*monitoring*)

Monitoring adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk menilai kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur dijalankan secara konsisten.⁵⁴ Sedangkan menurut Mulyadi, pengawasan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem akuntansi dan mendeteksi sedini mungkin adanya penyimpangan agar dapat segera diambil tindakan korektif.⁵⁵

⁵² Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akuntansi*, 87.

⁵³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 182.

⁵⁴ Kusuma Indawati, *Sistem Informasi*, 118.

⁵⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 184.

5) Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Informasi dan komunikasi adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi.⁵⁶ Informasi dan komunikasi merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang memastikan seluruh pihak terkait memperoleh informasi yang tepat waktu dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawabnya.⁵⁷

Menurut Mulyadi, komunikasi yang efektif membantu organisasi menyampaikan informasi penting kepada pihak internal maupun eksternal guna mendukung proses pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.⁵⁸

3. Pajak Air Permukaan

a. Pengertian Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang bersumber dari mata air, sungai, danau, waduk, saluran irigasi, atau sumber air lainnya yang terdapat di atas permukaan tanah. Pajak ini termasuk dalam jenis pajak daerah provinsi yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah tingkat provinsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PAP memiliki fungsi

⁵⁶ Kusuma Indawati Halim, *Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Terhadap Proses Bisnis*, 60–61.

⁵⁷ Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akuntansi*, 89.

⁵⁸ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 184.

sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air agar lebih berkelanjutan⁵⁹

b. Dasar Hukum Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dasar utama yang mengatur tentang pajak ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan bahwa PAP merupakan jenis pajak provinsi dan pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Selain itu, adapun beberapa dasar hukum yang digunakan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dalam pemungutan Pajak Air Permukaan yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 11 tahun 2019 tentang nilai perolehan air permukaan.
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 68 tahun 2017 tentang pemasangan alat ukur air dan penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 47 tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

⁵⁹ Pergub Jatim, pasal 21.

4) Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 67 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

c. Proses Pemungutan Pajak

Ketentuan proses pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan didasarkan pada sistem yang diterapkan, serta harus memenuhi berbagai asas pemungutan pajak.

Berikut adalah penjelasan mengenai Sistem Pemungutan Pajak:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang membeberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya seperti:

- a) Petugas pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak.
- b) Wajib pajak hanya bersifat pasif.
- c) Utang pajak ada setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh petugas.

2) Self Assessment System

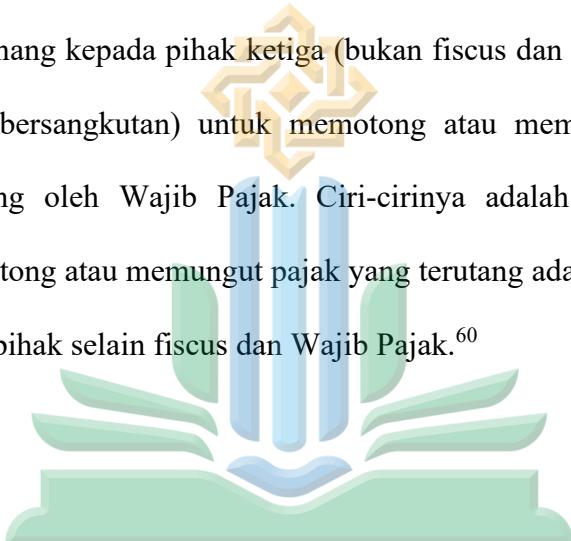
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:

- a) Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutangnya sendiri.

- b) Wajib Pajak aktif dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c) Petugas pajak tidak boleh ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Wisthholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiscus dan Wajib Pajak.⁶⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi, 2023), 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral.⁶¹ Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan berfokus pada proses, dengan menelaah hubungan antarvariabel yang membentuk objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan perspektif subjek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pajak air permukaan yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, yang dijelaskan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, yang beralamat di Jl. Teratai No. 10-11, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember. Dengan alasan pemilihan lokasi tersebut karena UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember telah mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi yang mendukung proses administrasi dan pelaporan keuangan. Ini menjadi peluang bagi peneliti untuk mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem tersebut dalam konteks pemungutan pajak.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 4.

C. Subyek Penelitian

Pada subyek penelitian ini mencakup semua data yang dapat digunakan sebagai informan atau narasumber, dan apa yang dicari. Karena subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perpajakan air permukaan, penentuan subjek ini dilakukan secara terstruktur, dengan menggunakan teknik purporsif.

Teknik *purposive* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang teliti.⁶² Teknik *purposive* ini digunakan dalam menetukan petugas pajak yang akan menjadi informan. Petugas pajak adalah anggota UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, yang bertanggung jawab untuk menagih pajak air permukaan terhadap wajib pajak.

- a. Bapak Faisal Ridwandi, S.E, M.M selaku kepala penagihan dan pembayaran.
- b. Ibu Nova Anggraini, A.Md selaku staf tata usaha yang mengelola admininstrasi penerimaan pajak air permukaan.
- c. Bapak Abdurrahman Dzaky, S.Mat., selaku staf kasi pendataan dan penetapan pajak bagian pajak air permukaan.

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian*, 95-96.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶³ Selanjutnya, jika ditinjau dari metode atau teknik pengumpulan data, terdapat tiga cara yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang tidak terlalu besar.⁶⁴ Pada kasus ini, peneliti dapat melihat proses penerimaan pajak air permukaan secara langsung dengan terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam penelitian. Data yang didapat dalam observasi ini adalah:

- Prosedur pemungutan pajak air permukaan.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, 2022), 203

- b. Penggunaan dan fungsi sistem informasi dalam pemungutan pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendalapanan Daerah Jember.
- c. Hambatan yang dialami oleh UPT Pengelolaan pendapatan daerah Jember dalam pengoperasian sistem infomasi untuk pemungutan pajak air permukaan.

2. Wawancara

Wawancara dikatakan sebagai teknik atau metode dalam pengambilan data di mana peneliti berbicara langsung dengan orang yang diwawancarai untuk menggali informasi mereka. Jadi dengan wawancara, maka peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁶⁵ Informasi yang dibutuhkan peneliti berupa:

- a. Alur dan prosedur pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP).
- b. Jenis dan fitur utama sistem informasi yang digunakan dalam pemungutan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendalapanan Daerah Jember.
- c. Hambatan yang dialami oleh UPT Pengelolaan pendapatan daerah dalam pengoperasian sistem infomasi untuk pemungutan pajak air permukaan, dalam wawancara ini dilakukan secara tatap muka dan melalui media elektronik.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kulitatif*, 114.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui dokumen, atau informasi yang didokumentasikan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen tertulis dan terekam, seperti:

- a. Data mengenai sistem pemungutan pajak air permukaan
- b. Data output sistem pajak air permukaan
- c. Hasil dokumentasi saat dilakukannya wawancara di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah proses tersebut selesai dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan analisis data bersifat interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan hingga data dianggap jenuh. Menurut Miles dan Huberman, tahapan dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.⁶⁷

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, bisa berlangsung selama beberapa hari

⁶⁶ Sugiyono, 124.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 132-142.

hingga berbulan-bulan, sehingga menghasilkan data yang melimpah. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi atau objek penelitian, mencatat seluruh hal yang dilihat dan didengar. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang beragam dan sangat kaya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum dan menyeleksi informasi yang paling penting, dengan memusatkan perhatian pada hal-hal pokok serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Proses ini membantu peneliti menyajikan data secara lebih jelas dan mempermudah dalam mencari data tambahan apabila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan bentuk serupa lainnya. Data yang disajikan merupakan hasil pengumpulan informasi yang relevan dengan pajak air permukaan serta pendapatan asli daerah. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi yang terjadi dan membantu peneliti merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan baru yang belum pernah diungkap pada penelitian sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya belum jelas, namun setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami.

F. Keabsahan Data

Maksud dari keabsahan data adalah dilakukannya pengujian data penelitian yang telah dipilih yaitu penelitian kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁸

Penelitian ini menerapkan triangulasi metode, yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh keakuratan informasi serta gambaran yang menyeluruh mengenai strategi pemungutan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁶⁹ Hal yang perlu dilakukan pada tahap-tahap penelitian

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian*, 56.

⁶⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

yaitu dilakukannya tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Pra Lapangan

Tahap pra-lapangan mencakup beberapa langkah yang harus dilalui oleh peneliti secara langsung. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi:

a. Menyusun Rencana Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan objek dan subjek yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya, peneliti menyusun serta mengajukan judul penelitian kepada koordinator program studi Akuntansi Syariah. Setelah itu, tahap berikutnya adalah menyusun proposal penelitian.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum dilakukannya penelitian, peneliti harus memilih lokasi. Lokasi penelitian adalah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Memilih lokasi ini karena penerimaan pajak air permukaan selalu melebihi target, meskipun wajib pajak air permukaan masih rendah.

c. Mengurus Perizinan

Karena penelitian merupakan kegiatan yang bersifat formal, peneliti wajib memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian tersebut.

d. Melakukan Survei Keadaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti belum mulai mengumpulkan data secara langsung. Peneliti masih berada pada fase orientasi lapangan, meskipun dalam beberapa keadaan sudah melakukan penilaian terhadap situasi yang ada. Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu mempelajari berbagai literatur atau mencari informasi dari informan mengenai kondisi dan situasi objek yang akan diteliti.

e. Memilih Informan

Informan memegang peran penting dalam penelitian karena mereka memberikan keterangan terkait situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai objek dan subjek yang menjadi fokus penelitian.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu menyiapkan berbagai perlengkapan yang menunjang proses penelitian, seperti alat tulis dan perangkat perekam.

g. Etika Melakukan Penelitian

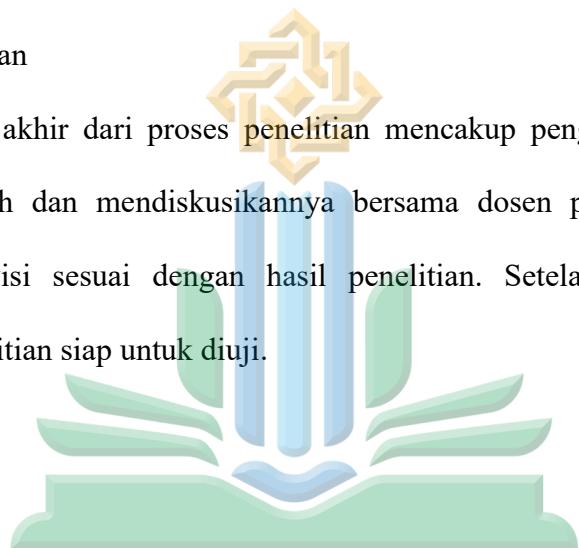
Sangat penting untuk memperhatikan etika dalam penelitian karena baik informan maupun peneliti harus merasa nyaman saat melakukannya. Jika etika penelitian tidak baik, informan tidak akan memberikan data yang diinginkan.

2. Pelaksanaan Penelitian

Tahapan ini dilakukannya kunjungan ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data apa saja yang diperlukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti juga mewawancarai informan sesuai dengan topik penelitian dan dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian

Tahap akhir dari proses penelitian mencakup pengolahan data yang telah diperoleh dan mendiskusikannya bersama dosen pembimbing untuk dilakukan revisi sesuai dengan hasil penelitian. Setelah laporan selesai disusun, penelitian siap untuk diuji.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan lembaga teknis yang berada langsung di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur. Keberadaan UPT ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bapenda dalam melaksanakan kegiatan operasional di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pemungutan pendapatan daerah. Tugas yang dijalankan UPT meliputi pengelolaan teknis pemungutan pajak dan retribusi, penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, serta pemberian layanan publik di bidang pendapatan daerah. Dengan demikian, UPT bukan hanya menjadi unit pelaksana, melainkan juga menjadi salah satu garda depan dalam mendukung optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD).

Di Kabupaten Jember, aktivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 3.293 km² yang secara geografis cukup luas. Kondisi geografis ini menjadikan peran UPT semakin penting, karena diperlukan pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten yang luas dan heterogen.

Secara fungsional, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemungutan pajak

daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, UPT juga berperan dalam memberikan bimbingan maupun pelayanan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan mudah. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.

Adapun lokasi kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember saat ini berada di Jalan Teratai No. 10-11, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang strategis dan relatif dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang disediakan.

2. Sosial Media

Dalam rangka mempermudah masyarakat, khususnya wajib pajak, untuk mengetahui informasi terkini terkait kegiatan maupun peraturan terbaru yang sedang berlaku, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember menyediakan sarana informasi melalui media sosial. Pemanfaatan media sosial ini diwujudkan dalam bentuk akun resmi Instagram dengan nama @uptppdjember serta akun Facebook dengan nama KB Samsat Jember. Kehadiran media sosial tersebut berperan sebagai media komunikasi dan transparansi publik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses informasi, memperluas jangkauan sosialisasi, serta mempererat hubungan antara UPT PPD Jember dengan masyarakat.⁷⁰

⁷⁰ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 13 Juni 2025.



Gambar 4.1
Instagram UPT PPD Jember



Gambar 4.2
Facebook UPT PPD Jember

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Proses Pemungutan

Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

a. Basis Data

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan basis data dalam sistem informasi akuntansi pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember berperan penting dalam pengelolaan data transaksi Pajak Air Permukaan (PAP). Basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh informasi terkait wajib pajak, volume penggunaan air, hasil penetapan, serta bukti pembayaran. Melalui sistem ini, seluruh data transaksi dapat diakses secara cepat dan terstruktur oleh pegawai yang berwenang, sehingga mempercepat proses verifikasi dan pelaporan pajak.

Penerapan sistem basis data tersebut menjadikan proses administrasi di UPT PPD Jember lebih efisien dan transparan. Data wajib pajak, SKPD, serta bukti pelunasan pajak yang sebelumnya dikelola secara manual kini tersimpan otomatis melalui aplikasi Pajak Air Permukaan yang terintegrasi dengan sistem provinsi. Dengan begitu, kesalahan pencatatan dan kehilangan data dapat diminimalkan.⁷¹ Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Pak Faisal selaku Kepala UPT PPD Jember, yang menyatakan:

“Kalau di sini, semua data wajib pajak sama data transaksi itu langsung masuk ke sistem. Jadi nggak manual lagi, mulai dari SKPD, bukti bayar, sampai rekening koran harian semuanya tersimpan di aplikasi. Jadi kita tinggal cek aja lewat sistem, datanya lengkap dan bisa dilacak kapan aja.”⁷²

⁷¹ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 13 Juni 2025.

⁷² Faisal Ridwandi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Agustus 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem basis data telah mendukung proses pengawasan dan pelaporan secara real time. Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Nova, petugas Pajak Air Permukaan, yang menjelaskan:

“Setiap ada pembayaran masuk, kita langsung input bukti bayarnya ke aplikasi Pajak Air Permukaan. Nanti sistem otomatis nyimpan data itu. Jadi misalnya Kepala UPT atau bendahara mau nyari data wajib pajak tertentu, tinggal ketik aja namanya, langsung keluar riwayat pembayarannya. Lebih cepat dan nggak rawan hilang.”⁷³

Selain itu, Pak Zaky selaku staf penetapan dan penagihan menambahkan:

“Semua dokumen kayak SKPD, tanda bukti penerimaan, sama rekening koran itu memang jadi sumber data utama. Kita kumpulkan dan cocokkan setiap hari, terus lapor ke bagian pembayaran.”⁷⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem basis data di UPT PPD Jember berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyimpanan, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk menjamin ketepatan data dan efisiensi proses pelaporan pajak. Sistem ini mendukung penerapan sistem informasi akuntansi yang andal, karena setiap transaksi tercatat otomatis dan dapat diverifikasi kapan pun dibutuhkan. Untuk beberapa dokumen yang digunakan oleh pajak air permukaan tersebut ialah:

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) disusun setelah dilakukan penetapan pajak dan diberikan kepada wajib pajak

⁷³ Nova Anggraini, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Agustus 2025.

⁷⁴ Abdurrahman Dzaky, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 September 2025.

sebagai pemberitahuan mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan. Selain memuat jumlah pajak terutang, SKPD juga mencantumkan kode *Virtual Account* Bank Jatim untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran.⁷⁵



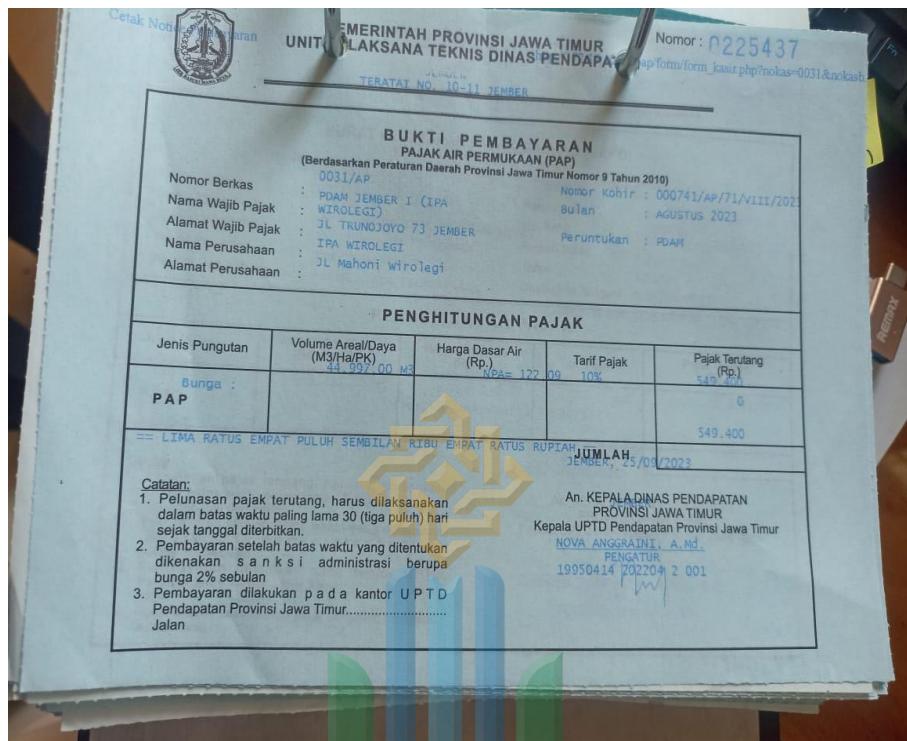
Gambar 4.3
Surat Ketetapan Pajak Daerah

2) Bukti Pembayaran

Bukti pembayaran diserahkan kepada wajib pajak setelah proses pelunasan pajak selesai dan dilakukan konfirmasi kepada petugas Pajak Air Permukaan sebagai bentuk verifikasi transaksi pembayaran.⁷⁶

⁷⁵ UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, "Surat Ketetapan Pajak Daerah," 13 Agustus 2025.

⁷⁶ UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, "Bukti Pembayaran," 13 Agustus 2025.

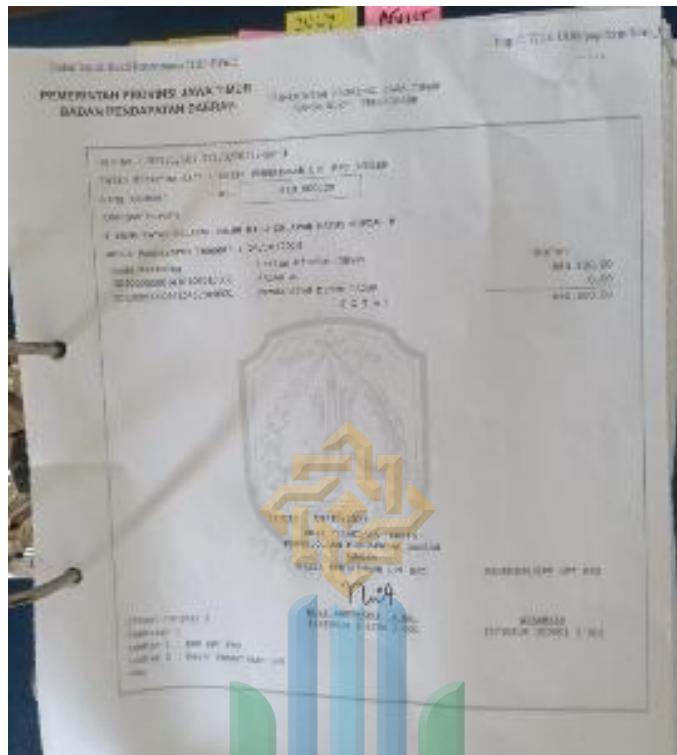


Gambar 4.4
Bukti Pembayaran

3) Tanda Bukti Penerimaan

Setelah bukti pembayaran dibuat, petugas pajak akan menerbitkan tanda bukti penerimaan sebagai laporan atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dokumen tersebut digunakan oleh UPT PPD sebagai dasar pencatatan keuangan dan alat untuk melacak transaksi yang telah berlangsung.⁷⁷

⁷⁷ UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, "Tanda Bukti Penerimaan," 13 Agustus 2025.



Gambar 4.5
Tanda Bukti Penerimaan

4) Rekening Koran

Selain membuat tanda bukti penerimaan, petugas juga menyusun rekening koran setiap hari apabila terdapat transaksi pembayaran pajak. Rekening koran tersebut berfungsi untuk mengetahui jumlah pemasukan yang terjadi dalam satu hari. Selanjutnya, laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Pembayaran dan Penetapan untuk dicocokkan dengan transaksi yang tercatat pada bank terkait.⁷⁸

⁷⁸ UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, "Rekening Koran," 13 Agustus 2025.

PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 DEKLARASI PENDAPATAN DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER				DOKUMEN : PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH DARI KONSEP PENDAPATAN PADA TAHUN : 2019/2020 (PAPAK SARAH)				
NO.	NOMOR REKON TAR	NOMOR REKEN KELUAR	NAMA	ALAMAT	No. BUNTAEN	JENIS PEMBAYARAN	PAP DENGAN	PAP DENGAN
1	1	AP 1 0001	ZIARAH PUP KARAWACIE	JL. SRIWIWIH PRADA	712/2023	TOTAL	1.828.620	0 1.828.620
2	2	AP 1 0002	ZIARAH PUP KARAWACIE	JLN. JEMERIA	713/2023	TOTAL	1.139.000	0 1.139.000
3	3	AP 1 0004	ZIARAH PUP KARAWACIE	JLN. SRIWIWIH PRADA	714/2023	TOTAL	82.000	0 82.000
4	4	AP 1 0005	ZIARAH PUP KARAWACIE	JLN. SRIWIWIH PRADA	715/2023	TOTAL	878.000	0 878.000
5	5	AP 1 0006	ZIARAH PUP KARAWACIE	JLN. SRIWIWIH PRADA	716/2023	TOTAL	100.000	0 100.000
6	6	AP 1 0007	ZIARAH PUP KARAWACIE	JLN. SRIWIWIH PRADA	717/2023	TOTAL	828.000	0 828.000
7	7	AP 1 0008	ZIARAH PUP KARAWACIE	JLN. SRIWIWIH PRADA	718/2023	TOTAL	82.000	0 82.000
8	8	AP 1 0009	ZIARAH PUP KARAWACIE	JLN. SRIWIWIH PRADA	719/2023	TOTAL	819.000	0 819.000
9	9	AP 1 0010	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	720/2023	TOTAL	1.821.000	0 1.821.000
10	10	AP 1 0013	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	721/2023	TOTAL	1.369.000	0 1.369.000
11	11	AP 1 0043	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	722/2023	TOTAL	466.000	0 466.000
12	12	AP 1 0048	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	723/2023	TOTAL	348.000	0 348.000
13	13	AP 1 0052	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	724/2023	TOTAL	124.100	0 124.100
14	14	AP 1 0056	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	725/2023	TOTAL	126.000	0 126.000
15	15	AP 1 0052	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	726/2023	TOTAL	124.100	0 124.100
16	16	AP 1 0053	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	727/2023	TOTAL	488.100	0 488.100
17	17	AP 1 0054	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	728/2023	TOTAL	124.100	0 124.100
18	18	AP 1 0055	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	729/2023	TOTAL	124.000	0 124.000
19	19	AP 1 0056	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	730/2023	TOTAL	141.100	0 141.100
20	20	AP 1 0057	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	731/2023	TOTAL	882.000	0 882.000
21	21	AP 1 0058	ZIARAH JEMERIA KEP. JEMERIA TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	732/2023	TOTAL	399.000	0 399.000
22	22	AP 1 0059	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	733/2023	TOTAL	128.000	0 128.000
23	23	AP 1 0060	ZIARAH JEMERIA KEP. JEMERIA TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	734/2023	TOTAL	286.000	0 286.000
24	24	AP 1 0070	ZIARAH JEMERIA DI JEMAAT TENGARAWAAN	JLN. JEMERIA	735/2023	TOTAL	188.000	0 188.000
JUMLAH PENDAPATAN PAPAK							12.882.800	0 12.882.800
2	28	AP 1 0084	PT J.A. MATTIE (DUAJU) PT	DUAJU KENDAL	736/2023	TRANSAKSI (TOL 1808712300000787)	824.000	0 824.000
3	29	AP 1 0085	PT J.A. MATTIE (DUAJU) PT	DUAJU KENDAL	737/2023	TRANSAKSI (TOL 1808712400000787)	297.000	0 297.000
JUMLAH PENDAPATAN PAPAK							1.121.400	0 1.121.400
JUMLAH PENDAPATAN PAPAK							14.302.200	0 14.302.200

REKENING
PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER

Gambar 4.6
Rekening Koran

Setiap dokumen berfungsi sebagai sumber data utama dalam **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER** sistem informasi akuntansi, karena memuat informasi rinci mengenai jumlah pajak terutang, status pelunasan, serta catatan keuangan daerah.

Data dari dokumen tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi Pajak

Air Permukaan, yang berperan sebagai basis data digital bagi seluruh kegiatan pemungutan pajak. Dengan adanya penyimpanan data secara elektronik, UPT PPD Jember dapat mengakses dan memverifikasi informasi keuangan dengan lebih cepat dan akurat.⁷⁹

Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran basis data dalam sistem informasi akuntansi dengan

⁷⁹ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 13 Juni 2025.

menempatkannya dalam konteks pelayanan publik daerah. Integrasi antara dokumen digital seperti SKPD, bukti pembayaran, dan rekening koran menjadi bukti bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di UPT PPD Jember telah berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi serta efisiensi pemungutan Pajak Air Permukaan.

b. Perangkat Lunak Akuntansi

Salah satu bentuk perangkat lunak akuntansi di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember dapat dilihat dari penggunaan aplikasi Sistem Pajak Air Permukaan. Aplikasi ini berfungsi sebagai basis data yang menyimpan seluruh informasi terkait wajib pajak, mulai dari identitas, jenis objek pajak, volume pemakaian air, hingga riwayat pembayaran pajak yang telah dilakukan.⁸⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Faisal, aplikasi ini dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan digunakan secara khusus untuk mencatat serta mengelola data objek Pajak Air Permukaan.

“Nama aplikasinya pajak air permukaan yang dibuat oleh provinsi. Jadi untuk aplikasi air permukaan itu untuk mencatat data obyek pajak air permukaan, besar pajak pemakaian air permukaan, dan jatuh tempo masa laku pemakaian pajak air permukaan. Untuk aplikasi ini hanya bisa di akses sama petugas pajak saja karena pakai sistem *office assessment*. Kalau di beberapa provinsi lain termasuk area diluar Jawa itu memang mereka sudah pakai aplikasi tapi sistemnya wajib pajaknya yang mengisi datanya sendiri.”⁸¹

⁸⁰ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 13 Juni 2025.

⁸¹ Faisal Ridwandi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Agustus 2025.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Bu Nova yang menjelaskan bahwa sistem Pajak Air Permukaan berbentuk website internal dan hanya dapat diakses melalui jaringan lokal (*line*) di komputer kantor, bukan melalui internet atau Wi-Fi umum.

“Bukan Aplikasi tapi apaya *website* Pajak Air Permukaan, *website* itu hanya bisa dibuka disini saja dikomputer, dan itu pun gak harus pakai wifi tapi pakai line jadi internal. PAP sistem pajaknya *office assessment* bukan kayak PPH. Kalau PPH kan *self assessment* ya, mereka yang daftar, mereka yang masukin gitu. Kalau ini *office assessment* jadi semua apa kata kita.”⁸²

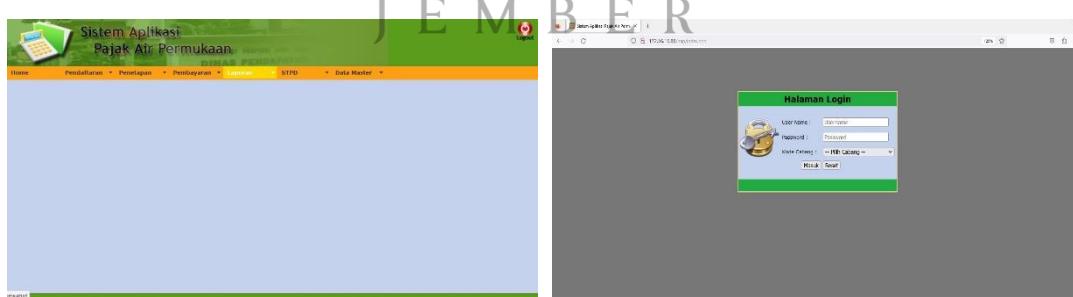
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa aplikasi Pajak Air Permukaan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemungutan pajak mulai dari pendataan, penghitungan, hingga penetapan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem ini menganut metode *office assessment*, di mana seluruh proses perhitungan dan penetapan pajak dilakukan sepenuhnya oleh pihak UPT berdasarkan hasil survei lapangan dan verifikasi data wajib pajak. Hal ini berbeda dengan sistem *self assessment* seperti pada Pajak Penghasilan (PPH), di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan kewajibannya sendiri. Dengan penerapan sistem berbasis internal ini, UPT dapat memastikan keakuratan data, ketepatan perhitungan, serta menghindari adanya kesalahan dalam proses penetapan pajak.

Melalui penggunaan aplikasi tersebut, proses pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT PPD Jember dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, akurat, dan terstruktur. Aplikasi ini membantu petugas dalam

⁸² Nova Anggraini, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Agustus 2025.

menghitung besaran pajak berdasarkan volume pemakaian air dan tarif yang berlaku, sekaligus memantau status pembayaran serta jatuh tempo setiap wajib pajak secara *real time*. Selain itu, data yang tersimpan secara otomatis dalam sistem dapat dimanfaatkan untuk penyusunan laporan keuangan daerah, sehingga meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Hal ini menunjukkan bahwa perangkat lunak memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas proses pemungutan pajak karena mampu mengotomatisasi pengolahan data dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Dengan demikian, penggunaan aplikasi Pajak Air Permukaan di UPT PPD Jember menunjukkan di mana perangkat lunak berperan penting dalam meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keandalan proses administrasi pajak.⁸³



Gambar 4.7
Aplikasi Pajak Air Permukaan

⁸³ UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, “Aplikasi Pajak Air Permukaan,” 14 Agustus 2025.

c. Perangkat Keras

Dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP), UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember memanfaatkan berbagai perangkat keras untuk mendukung kinerja sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai UPT, diketahui bahwa perangkat utama yang digunakan meliputi komputer PC dan *printer dot matrix*. Penggunaan kedua perangkat tersebut memiliki peran penting dalam pengolahan data serta pencetakan dokumen resmi yang berkaitan dengan penetapan dan pelunasan pajak.⁸⁴ Seperti yang dijelaskan oleh Pak Faisal:

“Kita pakai komputer PC sama *printer dot matrix*, kenapa pakai *printer dot matrix* bukan pakai printer biasa? Karena bukti ketetapan pajak dan pelunasan pajak itu dua lembar kertas *continuous form* makanya harus pakai *dot matrix*. Jadi yang diberikan ke WP itu yang asli tindasannya di kita. Kalau perawatan perangkat itu sudah ada *maintenance* sendiri, dari tiap kantor UPT itu punya perawatan *maintenance* perangkat namanya, lunak dan keras. Disitu ada pihak ke tiga, dari badan sudah ditunjuk pihak ke tiga untuk perawatan *maintenance* di tiap-tiap UPT.”⁸⁵

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Pak Zaky, yang menjelaskan bahwa format dokumen pajak yang digunakan memang mengharuskan penggunaan printer dot matrix:

“Jadi untuk perangkat keras disini itu pakai PC sama *printer dot matrix* karena kita pakai kertas *continuous form* yang dua lembar itu, jadi nanti yang lembar putihnya dikasihkan ke wajib pajak yang satunya disimpan kita buat arsip.”⁸⁶

⁸⁴ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 13 Juni 2025.

⁸⁵ Faisal Ridwandi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Agustus 2025.

⁸⁶ Abdurrahman Dzaky, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 September 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan perangkat keras berupa komputer PC dan *printer dot matrix* memiliki fungsi strategis dalam mendukung sistem informasi akuntansi di UPT PPD Jember. Penggunaan *printer dot matrix* dipilih karena dokumen pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Bukti Pelunasan Pajak dicetak menggunakan kertas *continuous form* dua rangkap, di mana lembar pertama diberikan kepada wajib pajak dan lembar kedua disimpan sebagai arsip resmi UPT. Sistem ini dinilai efisien karena hasil cetakan langsung menghasilkan salinan karbon sehingga meminimalkan kesalahan serta mempercepat proses administrasi dan pengarsipan. Selain itu, untuk menjaga performa perangkat keras agar tetap optimal, setiap UPT memiliki program *maintenance* rutin yang dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, penggunaan perangkat keras tersebut tidak hanya mendukung efisiensi kerja, tetapi juga menjamin keakuratan data serta kerapian administrasi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perangkat keras memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem informasi akuntansi di UPT PPD Jember. Komputer dan *printer dot matrix* menjadi sarana utama dalam mendukung aktivitas pencatatan, pengolahan data, serta penyusunan laporan keuangan pajak daerah. Pemilihan perangkat keras yang sesuai dengan karakteristik dokumen

pajak juga menunjukkan adanya efisiensi dan ketepatan kerja dalam sistem administrasi pajak air permukaan.⁸⁷

Dengan demikian, penerapan perangkat keras pada sistem informasi akuntansi di UPT PPD Jember yang memadai dan sistem perawatan yang rutin berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja pegawai, keakuratan dokumen, serta ketertiban administrasi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan.

d. Prosedur Akuntansi

Ada beberapa prosedur yang dilakukan dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan yaitu prosedur pendaftaran Wajib Pajak, prosedur penetapan pajak, dan prosedur pembayaran Pajak Air Permukaan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Timur.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara, Pak Faisal menjelaskan bahwa prosedur pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dilakukan dengan metode pembayaran melalui *Virtual Account* (VA). Beliau menerangkan:

“Proses penginputan data itu yang pertama kita melakukan survei lapangan, survei ketempat pajak air permukaannya. Setelah itu dihitung volume pemakaian air tersebut, berapa sih volumenya. Setelah itu dihitung berdasarkan tarif yang sudah ada sesuai Pergub, maka jadilah pajak air permukaan. Nah setelah itu didata semua itu dari pemiliknya, terus jumlah pemakaianya, perbulan dihitung kira-kira berapa yang belum menggunakan meter air (taksasi). Kalau sudah menggunakan meter air kita tinggal lihat

⁸⁷ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 29 Agustus 2025.

⁸⁸ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 29 Agustus 2025.

pemakaianya dalam satu bulan berapa m³, nanti dikalikan dengan apa namanya, item-item tarif-tarif yang sudah ada di Pergub nanti habisnya berapa satu bulan. Setelah itu barulah dimasukkan data itu ke dalam aplikasi Pajak Air Permukaan bahwa si PT A jalan ini dengan komplet identitasnya, jalan apa desa mana terus Perusahaan apa, terus pemakaian airnya perbulan itu berapa kan gitu, dan nanti jadilah surat ketetapan namanya. Surat penetapan pajak air permukaan dari surat penetapan air itu nanti kita kirim ke Wajib Pajaknya ke PT itu untuk melakukan pembayaran sesuai dengan surat ketetapan pajak air permukaan yang sudah kita kirim. Setelah mereka menerima mereka itu bisa melakukan pembayaran, cukup pakai VA transfer. Nah setelah pakai VA mereka konfirmasi ke kita dengan mengirimkan nomor pembayarannya yang sudah berhasil baru nanti kita verifikasi disini pembayarannya itu untuk masuk ke kas daerah dan diterbitkan pelunasannya. Barulah pelunasannya dikirim ke Wajib Pajak retribusi air permukaan itu.”⁸⁹

Sementara itu, Bu Nova memberikan tambahan penjelasan terkait proses pencatatan dan penyampaian tagihan kepada wajib pajak. Beliau mengatakan:

“Setelah jadi obyek kitakan catat ya pas survei itu berapa si volume yang digunakan sama si Wajib Pajak inikan. Setelah kita dapatkan kita masukkan ke aplikasi untuk pemakaian bulan ini PT A memakai volume segini sehingga keluarlah nilai pajak gitu. Kalau sudah penetapan pajak keluarlah namanya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau kalau Perusahaan biasanya bilangnya apa ya *invoice* ya, kayak surat tagihan gitulah. Cuman kalau disini namanya SKPD. SKPD itu nanti kita sampaikan ke wajib pajak sebagai pendukung kalau kita nagih, ini loh pak samean kena pajaknya segini bulan ini gitu. Ngirimkannya itu kan SKPD itu fisik ya, itu kita nagihnya opsional kita bisa difoto, dikirim WA ke WP atau kita ngasihkan langsung gak papa. Biasanya itu ada gini SKPD kan keterangannya bisa bayar pakai *virtual account* atau *cash*. Biasanya kalau *cash* itu WPnya difotoin dulu pas kesini sekalian bayar sama sekalian ambil bukti bayarnya. Kalau *virtual account* difoto itukan ada nomornya ya cuman dia ngetik nomor rekening klik bayar sudah selesai, kayak gitu.”⁹⁰

⁸⁹ Faisal Ridwandi, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Agustus 2025.

⁹⁰ Nova Anggraini, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa prosedur pemungutan pajak air permukaan dilakukan secara terstruktur mulai dari survei lapangan hingga penerbitan bukti pelunasan pajak. Tahap awalnya yaitu survei untuk mengetahui lokasi objek pajak serta menghitung volume pemakaian air oleh wajib pajak. Data hasil survei kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam aplikasi Pajak Air Permukaan untuk menentukan besaran pajak sesuai tarif yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur. Setelah data diverifikasi, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berisi jumlah pajak terutang dan dikirimkan kepada wajib pajak sebagai dasar pembayaran.

Proses pembayaran pajak air permukaan dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai melalui sistem *Virtual Account* (VA). Wajib pajak yang memilih metode VA cukup melakukan transfer sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam SKPD, kemudian mengirimkan bukti pembayaran kepada pihak UPT untuk diverifikasi. Setelah pembayaran dikonfirmasi masuk ke kas daerah, petugas menerbitkan bukti pelunasan yang dikirim kembali kepada wajib pajak. Sementara itu, untuk pembayaran secara tunai, wajib pajak datang langsung ke kantor UPT untuk melakukan pembayaran dan menerima bukti pelunasan di tempat. Prosedur ini dinilai efektif karena mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran sekaligus

memastikan penerimaan pajak masuk ke kas daerah secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Beberapa prosedur yang dilakukan dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan sesuai dengan SOP yang berlaku adalah seperti berikut:

1) Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak

Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan air permukaan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan harus mendapatkan izin atas pemanfaatan atau penggunaan air permukaan dari dinas yang terkait. Pendaftaran Wajib Pajak Air Permukaan dilakukan untuk mengetahui identitas usaha dan pemilik. Adapun prosedur pendaftaran Wajib Pajak baru sebagai berikut:

a) Wajib pajak mengisi surat keterangan usaha, KTP penanggung jawab, dan akta pendirian (bila ada).

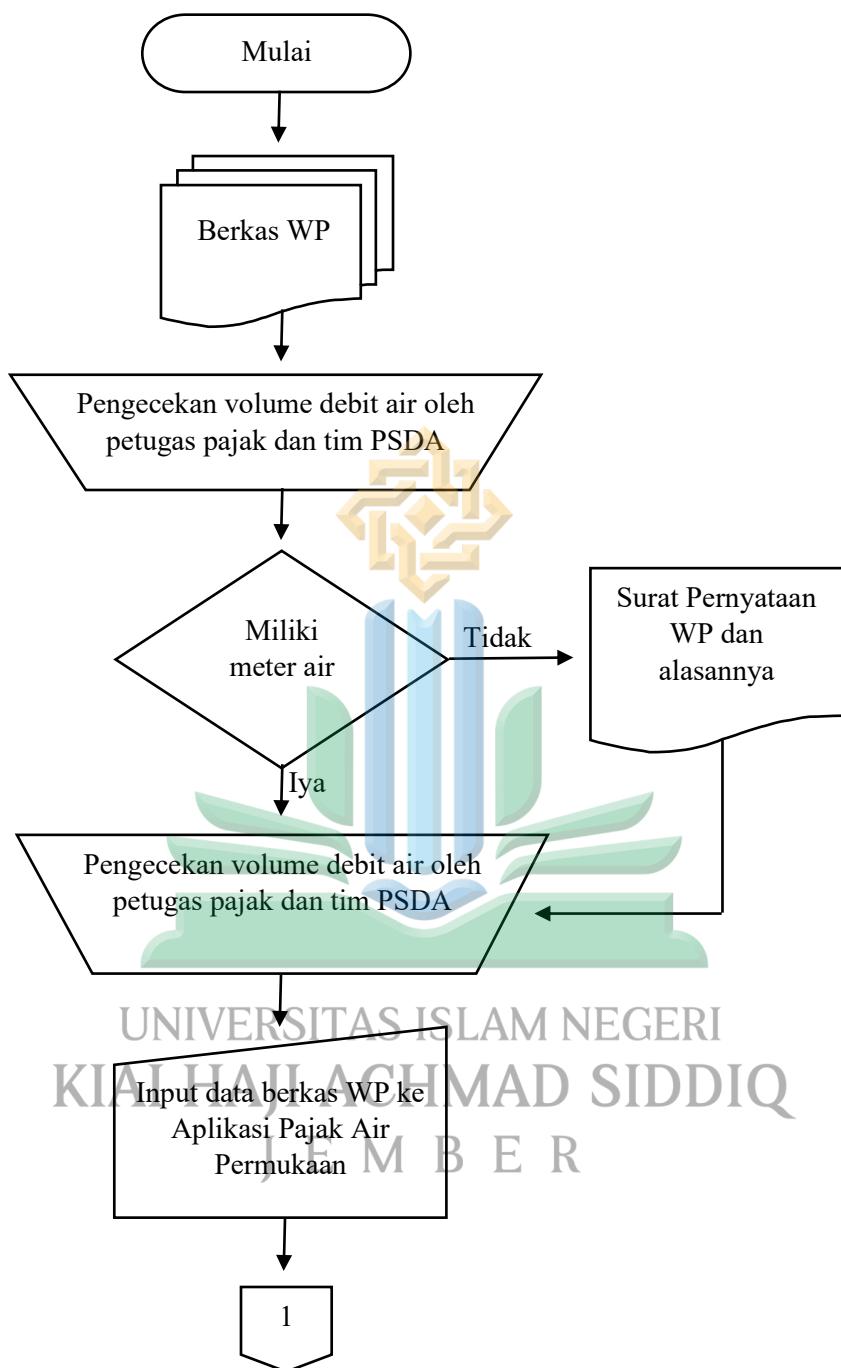
b) Petugas pajak air permukaan melakukan pengecekan volume debit air yang dipakai bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), dan hasilnya dicatat menjadi berita acara pengakuan pemanfaatan dan/atau pengambilan air permukaan.

c) Setiap wajib pajak yang tidak mampu memasang meter air, harus dilengkapi dengan surat pernyataan beserta alasannya.

- d) Petugas melakukan input data wajib pajak pada aplikasi Pajak Air Permukaan, meliputi: nama obyek, alamat obyek, volume izin, tanggal izin, tanggal masa laku izin, meter/non meter, peruntukan, dan nilai NPAP.⁹¹



⁹¹ UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, "SOP Pendaftaran Wajib Pajak," 8 September 2025.



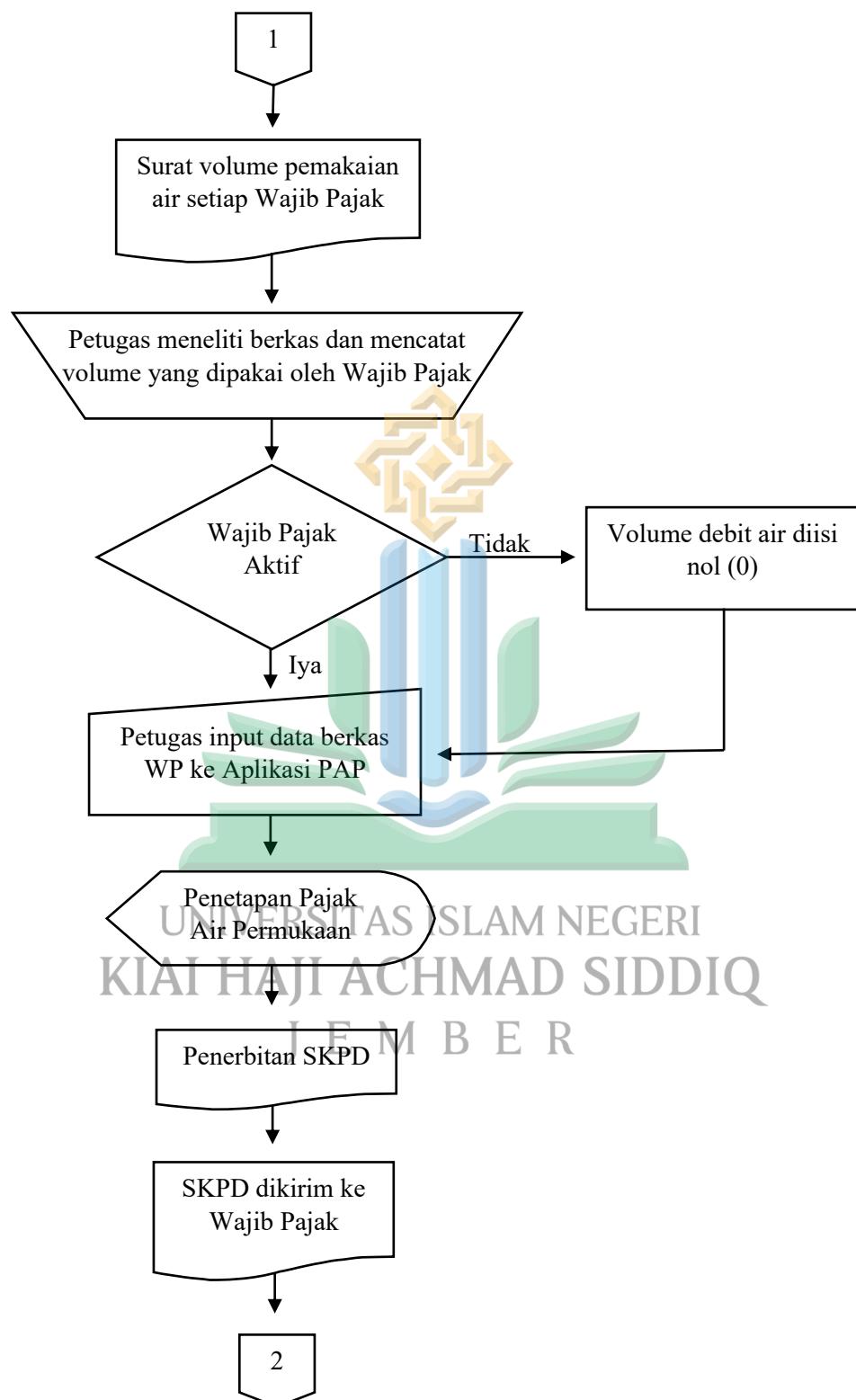
Gambar 4.8
Flowchart Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak diolah oleh peneliti

2) Prosedur Penetapan Pajak

Penetapan pajak dilakukan untuk mengetahui besarnya pajak yang dihitung berdasarkan hasil pendataan dan pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk pemakaian bulan sebelumnya. Untuk prosedur penetapannya sebagai berikut:

- a) Petugas menerima surat pemberitahuan pemakaian air permukaan dari wajib pajak yang telah dilakukan pengecekan oleh tim PSDA.
- b) Petugas meneliti berkas dan menginput data NPAP dan volume debit air yang digunakan pada aplikasi Pajak Air Permukaan untuk menetapkan besarnya pajak sesuai tarif yang berlaku.
- c) Petugas membuat formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari hasil penetapan, yang diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- d) Wajib pajak yang berhenti sementara aktifitas pengambilan dan/atau pemanfaatan, tetap dilakukan penetapan dengan cara penetapan volume 0 (nol).
- e) Petugas mengirimkan SKPD kepada wajib pajak secara langsung atau softcopy melalui whatsapp atau email.⁹²

⁹² UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, “SOP Penetapan Pajak,” 8 September 2025.



Gambar 4.9
Flowchart Prosedur Penetapan Pajak diolah oleh peneliti

3) Prosedur Pembayaran Pajak Ari Permukaan

Pembayaran dilaksanakan setelah penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan akan jatuh tempo 30 hari setelah penetapan. Pembayaran pajak air permukaan memiliki dua opsi pembayaran yaitu pembayaran tunai dan non tunai melalui *Virtual Account (VA)* Bank Jatim. Adapun prosedur pembayaran pajaknya sebagai berikut:

- a) Wajib PAP menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari petugas Bapenda Jatim yang berisi jumlah PAP yang wajib dibayar dan nomor *Virtual Account (VA)* Pembayaran.
- b) Wajib PAP dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai dengan cara sebagai berikut:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 (1) Tunai
- (a) Mendarangi Teller Bank Jatim / bank selain Bank Jatim dengan menunjukkan nomor VA pada SKPD.
 - (b) Mendarangi loket pembayaran PAP pada kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) terdekat dengan menunjukkan SKPD.

(2) Non Tunai

(a) Menggunakan Mobile Banking atau ATM Bank

Jatim melalui menu pembayaran VA dengan memasukkan nomor VA yang tertera pada SKPD.

(b) Menggunakan Mobile Banking Bank selain Bank

Jatim melalui menu transfer antar bank dengan memasukkan kode bank (114) dan nomor VA.

(c) Wajib PAP akan mendapatkan bukti pembayaran baik dari Teller Bank maupun dari aplikasi Mobile Banking.

Melalui *Mobile Banking* / ATM Bank Jatim

(a) Pilih menu pembayaran;

(b) Pilih menu *Virtual Account*;

(c) Masukkan nomor *Virtual Account* yang tertera pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
(Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau STPD
(Surat Tagihan Pajak Daerah) Pajak Air Permukaan
dan tekan selanjutnya;

(d) Akan muncul nama Wajib Pajak dan nominal Pajak

Air Permukaan yang sama dengan yang tertera di
SKPD atau STPD;

(e) Lanjutkan transaksi sampai berhasil;

- (f) Simpan bukti transaksi berupa struk (untuk ATM) atau *print screen/screen capture (internet banking/mobile banking)*.

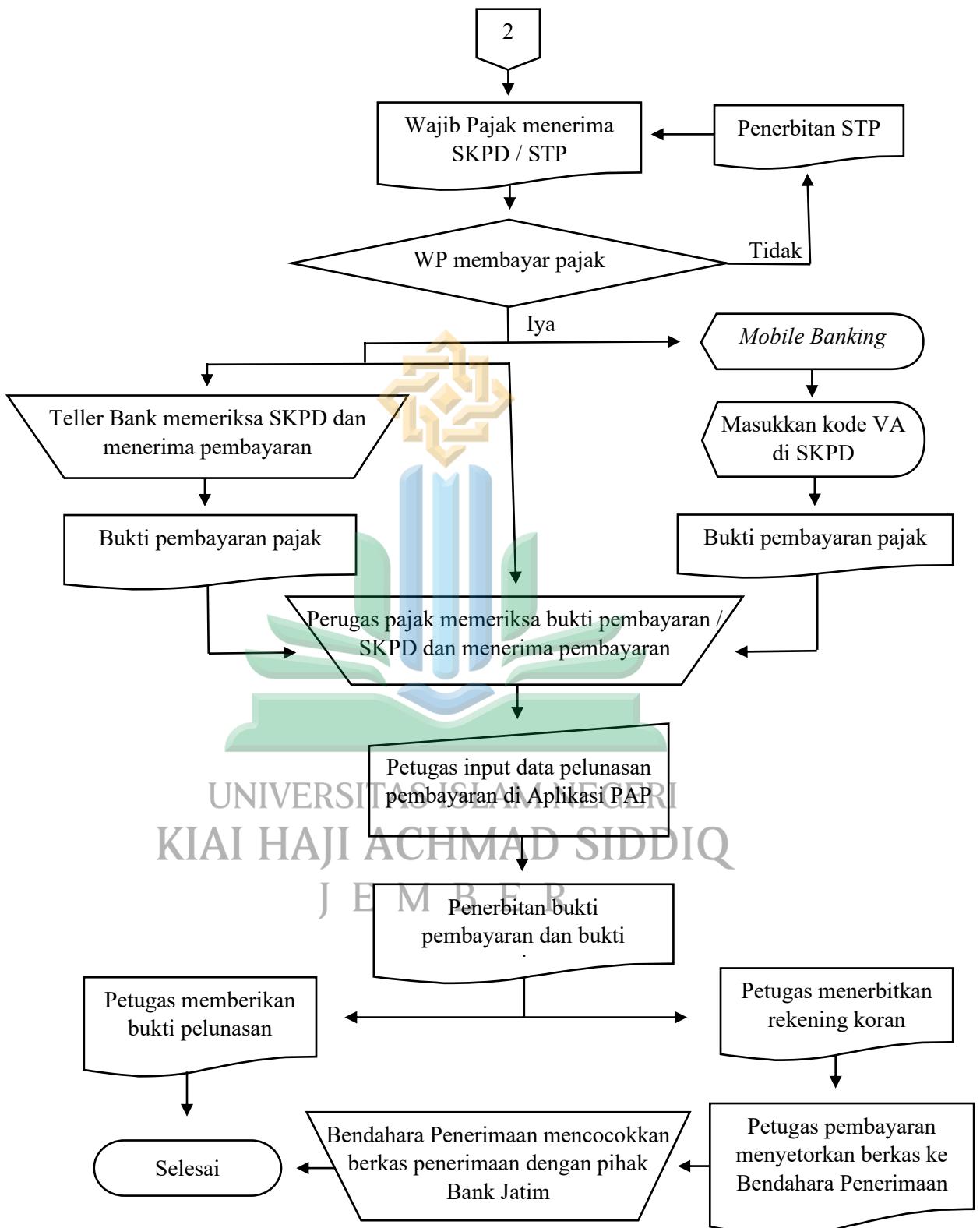
Melalui *Mobile Banking/Internet Banking* selain Bank Jatim

- (a) Pilih menu transfer antar bank;
 - (b) Tujuan transfer pilih “Bank Jatim”;
 - (c) Masukkan kode bank (kode Bank Jatim: 114) dan nomor rekening diisi dengan nomor *Virtual Account* yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Pajak Air Permukaan;
 - (d) Masukkan nominal sesuai dengan yang tertera di SKPD atau STPD. Nominal yang dimasukkan harus sama (tidak boleh lebih atau kurang);
 - (e) Lanjutkan transaksi sampai berhasil;
 - (f) Simpan bukti transaksi;
- c) Petugas menerima dan meneliti berkas SKPD/STPD/serta uang tunai/slip setoran/bukti transfer.
- d) Petugas melakukan proses pelunasan pembayaran wajib pajak pada sistem aplikasi, dan memberikan bukti lunas pembayaran kepada wajib pajak.

- e) Setelah pembayaran diterima, petugas membuat laporan penerimaan untuk diserahkan dan dilaporkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu UPT PPD untuk diproses lebih lanjut.⁹³



⁹³ UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, "SOP Pembayaran Pajak Air Permukaan," 8 September 2025.



Gambar 4.10
Flowchart Prosedur Pembayaran Pajak Air Permukaan diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa prosedur akuntansi dalam proses pemungutan pajak air permukaan telah dijalankan secara terstruktur, transparan, dan terdokumentasi. Setiap tahapan memiliki alur yang jelas mulai dari pendataan, penetapan, hingga pelaporan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan memperkuat akuntabilitas administrasi pajak.⁹⁴

Dengan demikian, penerapan prosedur akuntansi di UPT PPD Jember telah memenuhi prinsip dasar sistem informasi akuntansi yang efektif. Setiap tahapan dijalankan dengan pembagian tugas yang jelas, dukungan sistem digital, serta pengawasan bertahap, sehingga mendukung terciptanya transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pemungutan Pajak Air Permukaan.

2. Penerapan Pengendalian Internal Di UPT Pengelolaan Pendapatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Daerah Jember Untuk Mendukung Sistem Informasi Akuntasi
KIAI HAI AL ACHMAD SIDDIQ
Dalam Proses Pemungutan Pajak Air Permukaan

a. Lingkungan Pengendalian

Salah satu bentuk lingkungan pengendalian di UPT PPD Jember adalah struktur organisasi. Struktur organisasi UPT PPD Jember dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dibantu oleh Kepala Tata Usaha serta dua seksi, yaitu Seksi Pendataan dan Penetapan serta Seksi Penagihan dan Pembayaran, juga ada staf tata usaha. Masing-masing

⁹⁴ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 29 Agustus 2025.

bagian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling mendukung, sehingga pembagian kerja di dalam UPT PPD Jember menjadi lebih terarah dan mampu menunjang efektivitas pemungutan pendapatan daerah.⁹⁵

Bapak Faisal menjelaskan bahwa pembagian tugas di lingkungan kerja UPT PPD Jember sudah diatur secara jelas melalui struktur organisasi yang berlaku. Beliau menyampaikan:

“Kalau di sini itu sudah ada pembagian tugasnya masing-masing. Jadi ada yang bagian pendataan, ada yang bagian penetapan pajak, penagihan, sama pelaporan. Semua sudah diatur di SOP dari Bapenda Provinsi, jadi tiap pegawai tinggal jalan sesuai fungsinya. Misalnya petugas penetapan ya fokus di data wajib pajak, yang bagian penagihan ya ngurus surat tagihan sama koordinasi pembayaran. Jadi kerjaannya gak tumpang tindih.”⁹⁶

Bu Nova juga memberi penjelasan:

“Jadi setiap bagian itu selalu dipantau, terutama yang berkaitan sama pencatatan dan pelaporan pajak. Kepala UPT juga rutin evaluasi terkait kinerja pegawai, supaya kalau ada kendala di lapangan bisa langsung dibahas dan diselesaikan. Biasanya kita ada briefing setiap hari waktu pagi buat memastikan semua prosedur dijalankan sesuai ketentuan dan pemberitahuan agenda tertentu juga kadang-kadang, jadi semua petugas itu tau.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penerapan lingkungan pengendalian di UPT PPD Jember diwujudkan melalui penetapan struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas antar pegawai berdasarkan fungsi masing-masing. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang spesifik, seperti petugas pendataan, penetapan

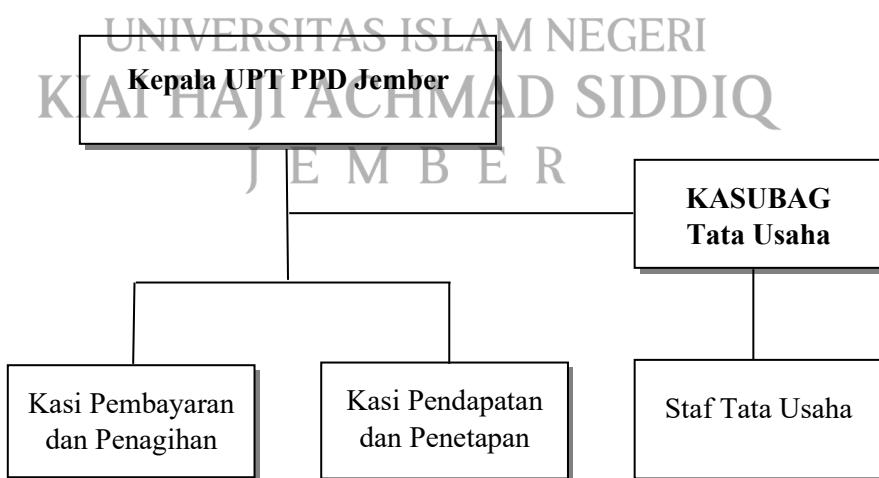
⁹⁵ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 13 Juni 2025.

⁹⁶ Faisal Ridwandi, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Agustus 2025.

⁹⁷ Nova Anggraini, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Agustus 2025.

pajak, penagihan, dan pelaporan. Pembagian tugas tersebut dituangkan dalam *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional.

Selain itu, UPT PPD Jember juga menerapkan sistem pengawasan bertahap, di mana kepala UPT melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan pajak. Kegiatan *briefing* harian dilakukan untuk membahas kendala lapangan serta memastikan setiap prosedur dijalankan sesuai ketentuan. Lingkungan kerja yang disiplin dan transparan ini membentuk budaya organisasi yang menekankan tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Berikut adalah struktur organisasi di UPT PPD Jember:⁹⁸



Gambar 4.11
Struktur Organisasi UPT PPD Jember

⁹⁸ UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, “Struktur Organisasi,” 13 Agustus 2025.

Dalam struktur organisasi ini, setiap bagian memiliki tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk tugas setiap bagian yaitu:

1) Kepala UPT PPD Jember

- a) Mengarahkan, mengintegrasikan, serta menyelaraskan seluruh kegiatan yang berada di bawah kewenangannya.
- b) Menjadi pengawas sekaligus pelaksana sistem pengendalian internal di lingkup kerjanya.
- c) Memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan arahan dan instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.

2) KASUBAG Tata Usaha

- a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi umum di lingkungan UPT.
- b) Mengawasi dan mengarahkan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan kantor.
- c) Memberikan bimbingan teknis kepada staf dalam pelaksanaan tugas administrasi.
- d) Memimpin pengaturan urusan rumah tangga kantor agar berjalan tertib dan efisien.
- e) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja, rencana anggaran, serta dokumen peraturan.

f) Mengendalikan kegiatan kearsipan dan dokumentasi administrasi UPT.

g) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan UPT.

3) Kasi Pembayaran dan Penagihan

a) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk seksi pembayaran serta penagihan.

b) Memeriksa, menghimpun, serta membukukan bukti pembayaran dari bendahara penerima berdasarkan surat tanda setoran.

c) Menerima dan menghimpun surat ketetapan pajak daerah sebagai dasar penagihan.

d) Melaksanakan verifikasi atas pembayaran pajak daerah.

e) Menjalankan proses penerimaan, pembukuan, penerbitan, penindaklanjutan surat perpajakan daerah, serta mendistribusikannya sesuai prosedur.

4) Kasi Pendapatan dan Penetapan

a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk seksi pendataan serta penetapan.

b) Mengelola data terkait objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah di wilayah kerja.

c) Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan dan retribusi daerah.

- d) Menyusun bahan untuk penetapan pajak dan retribusi daerah.
- e) Membuat perhitungan serta proyeksi penerimaan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

5) Staf Tata Usaha

- a) Menyelenggarakan layanan administrasi umum.
- b) Mengelola administrasi kepegawaian.
- c) Mengelola administrasi keuangan.
- d) Menangani administrasi perlengkapan serta sarana kantor.
- e) Menjalin hubungan masyarakat.
- f) Mengelola urusan rumah tangga kantor.
- g) Menyusun program kerja, anggaran, serta rancangan peraturan perundang-undangan.
- h) Melakukan pengarsipan seluruh dokumen di lingkungan UPT.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian di UPT PPD Jember telah dibangun dengan memperhatikan aspek integritas, kompetensi, dan kepemimpinan yang efektif. Adanya struktur organisasi yang jelas serta kebijakan operasional yang tegas menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi penerapan sistem informasi akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, penerapan lingkungan pengendalian di UPT PPD Jember telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal. Struktur organisasi yang tertata, pembagian tugas yang jelas, serta komitmen terhadap integritas dan tanggung jawab menjadi dasar penting dalam menjaga keandalan sistem informasi akuntansi pada proses pemungutan Pajak Air Permukaan.

b. Penilaian Risiko

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tentu menghadapi berbagai risiko di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai UPT, diketahui bahwa risiko tersebut dapat berasal dari faktor lapangan maupun dari sistem administrasi perusahaan wajib pajak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal:

“Kalau risiko lebih ke manusiannya, karena memang medannya agak terjal, licin, berbatu. Kalau masalah pembayaran itu biasanya terkait sistem masing-masing Perusahaan. Kalau kita tetap menetapkan tanggal 10 perbulan, setelah ditetapkan kita kirim toh penetapannya ke masing-masing WP. Setelah itu biasanya sih dia itu setelah menerima surat ketetapan dari kita, iya kalo kantornya ada disini langsung bisa diproses, nah kalo kantornya kayak PTP dekat Rembang itu kan kantor pusatnya ada di Jakarta. Nah itu dia kirim dulu lewat WA atau diemail ke sana, setelah disana itu merespon dan memberi izin untuk pembayaran barulah dilakukan pembayaran. Proses itu yang agak memakan waktu, kalau yang Perusahaannya memang disini ya gak ada masalah, malah mereka datang kesini. Untuk penanganan Solusi diserahkan ke pihak manajemen. Yang penting surat ketetapan resmi dari kita sudah disampaikan kepusatnya. Karena biasanya kalau yang cabang itu tidak bisa punya kewenangan untuk mengeluarkan pembayaran, disetujui dulu barulilakukan gitu atau langsung transfer langsung dari pusat pakai VA. Setelah diverifikasi dicetaklah bukti

pelunasan kita kirim balik biasanya, baik melalui WA, email, atau melalui pos.”⁹⁹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bu Nova:

“Risikonya mungkin ini ya, kan banyak PT itu yang keuangannya terpusat ke *head office* itu kantor pusat ya. Contoh aja kayak Perkebunan ini Tugusari itu semua pembayaran itu bukan di Tugusari Bangsal tapi di Jakarta. Jadi kitakan infokan ya pak ini tagihannya segini, mereka juga infokan ke Jakarta, sehingga semua pembayarannya yang melakukan itu Jakarta pakai *Virtual Account*, yaitu kesusahannya itu kita gak bisa mantau, karena kita *ngepushi* cabang. Cabang juga ya apa lagi kita juga nunggu pusat. Kebanyakan yang lewat dari akhir bulan ini si ini yang pakai keuangan di pusat.”¹⁰⁰

Selain itu, Pak Zaky juga menambahkan mengenai risiko di lapangan:

“Risiko itu kalau kelapangan itu ya medannya itu kan titik sumber itu kan gak dipinggir jalan gitukan, kadang itu ada yang harus turun lembah dulu. Walaupun tidak begitu potensinya tapi kita harus kesana sekecil apapun kita harus data kalau kita tau. Kita koordinasi dulu ke SDA (Pengelola Sumber Daya Air) baru kalau kita sudah sama-sama bisa barulah kita buat surat ke PSDA akan dilakukan survei ke lapangan ke ini gitu. Tidak tiba-tiba berangkat karena kita kerja sama dengan dinas lain.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Pajak Air Permukaan di UPT PPD Jember, diketahui bahwa penilaian risiko dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan evaluasi terhadap potensi kesalahan atau hambatan dalam proses pemungutan pajak. Salah satu bentuk penilaian risiko yang dilakukan adalah pengecekan ulang terhadap data wajib pajak dan volume penggunaan air sebelum penetapan pajak dilakukan. Petugas memastikan data yang diterima dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sesuai dengan hasil

⁹⁹ Faisal Ridwandi, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Agustus 2025.

¹⁰⁰ Nova Anggraini, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Agustus 2025.

¹⁰¹ Abdurrahman Dzaky, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 September 2025.

pengukuran lapangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan besaran pajak.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembayaran pajak, UPT PPD Jember juga menilai risiko keterlambatan pembayaran yang dapat memengaruhi target penerimaan daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas melakukan pengawasan berkala terhadap jadwal pembayaran wajib pajak. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya piutang pajak dan menjaga ketepatan waktu penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa UPT PPD Jember telah memiliki mekanisme penilaian risiko yang cukup baik, meskipun masih dilakukan secara manual dalam beberapa tahap. Proses identifikasi risiko dilakukan berdasarkan pengalaman kerja dan hasil koordinasi antarbidang. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran dari pihak UPT terhadap pentingnya mengelola risiko sejak dini untuk menjaga efektivitas sistem informasi akuntansi dan akurasi pelaporan pajak.¹⁰²

Dengan demikian, penerapan penilaian risiko di UPT PPD Jember telah berjalan sesuai dengan prinsip pengendalian internal. Langkah-langkah identifikasi dan evaluasi risiko yang dilakukan secara rutin membantu menjaga keandalan sistem informasi akuntansi serta

¹⁰² Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 8 September 2025.

mendukung ketepatan penerimaan Pajak Air Permukaan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

c. Prosedur Pengendalian

Untuk mencapai target penerimaan pajak, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember menerapkan prosedur pengendalian yang sistematis melalui pembagian tugas yang jelas kepada setiap petugas pajak. Setiap bagian memiliki tanggung jawab spesifik, mulai dari penetapan, penagihan, hingga pelaporan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Prosedur ini juga didukung dengan koordinasi dan evaluasi rutin guna memastikan seluruh kegiatan pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nova, diketahui bahwa salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan adalah pengaturan jadwal dan pengawasan pembayaran wajib pajak agar tidak terjadi keterlambatan. Beliau menjelaskan:

“Salah satu kebijakannya itu kita usahakan akhir bulan pembayaran Wajib Pajak semua sudah lunas. Kalau misalkan katakanlah kita penetapan tanggal 10 ya harusnya matinya kan tanggal 9/10 mungkin ya, terus WP ini baru bisa bayar tanggal 15, gak punya uangkan sapai tanggal 10. Kita ngeluarkan lagi Namanya STP (Surat Tagihan Pajak) tapi selama ini di UPT Jember ini gak sampai nyetak itu. Kalau STP nanti ada ininya keluar angka dendanya berapa gitu sehingga total pajak yang dibayarkan otomatiskan selisih sama yang awalkan. Karena obyeknya Jember banyakkan 100 lebih makanya yang nagih itu kita bagi, itu tugasnya sie pendataan. Katakanlah sie pendataan ada lima, nanti lima inikebagian data kesiapaan gitu. Kan gak mungkinkan semua

¹⁰³ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 14 Agustus 2025.

100 dikasih ke aku semua ini mbk tanggungjawabmu, kan gak mungkinkan, mangkanya dibagi. Tapi aku sebagai kasir UPT punya kewajiban update ke Kepala Seksi Bu Rahel, update sampai tanggal sekarang yang belum bayar ini Bu. Nanti Bu Rahel yang umumkan ke grup ke anak-anak ini. Jadi ini loh obyek-obyek yang belumbayar, jadi anak-anak ini sebagai pemegang obyek itu juga tauharus WA atau telepon si WP lagi. Jadi komunikasinya gak boleh keputus.”¹⁰⁴

Pernyataan Bu Nova menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan tidak hanya melalui sistem, tetapi juga lewat pembagian tanggung jawab yang proporsional antarpetugas lapangan. Pembagian data wajib pajak kepada setiap petugas pendataan dilakukan agar proses penagihan berjalan lebih efektif. Selain itu, terdapat mekanisme pelaporan internal yang dilakukan secara berkala kepada Kepala Seksi Penetapan, yang kemudian menginformasikan perkembangan pembayaran melalui grup komunikasi internal. Hal ini menunjukkan adanya bentuk pengendalian berbasis koordinasi dan pelaporan berjenjang agar tidak ada wajib pajak yang terlewat.

Hal serupa diungkapkan oleh Pak Zaky, staf bagian penetapan pajak, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan batas waktu pembayaran.:

“Kebijakan dari badan Bapenda yang disurabaya yang mengultimatumkan kalau jangan sampai ada tunggakan dan Pajak Air Permukaan selama ini belum ada yang telat. Sempat ditahun 2024 kemarin, di aitu transfer tapi transfernya ditanggal 31, jadi masuk laporan dibulanan berikutnya, jadi tercatat tunggakan padahal tidak. Secara hitungan jatuh temponya memang tanggal 10 bulan depan, tapi secara laporan dikita itu jadi tunggakan. Jadi mau

¹⁰⁴ Nova Anggraini, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Agustus 2025.

gak mau kita harus aktif hubungi wajib pajak biar mereka bayar sebelum akhir bulan.”¹⁰⁵

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa prosedur pengendalian di UPT PPD Jember tidak hanya berfokus pada verifikasi data dan pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup mekanisme pemantauan dan komunikasi aktif dengan wajib pajak. Strategi ini membantu memastikan seluruh pembayaran dilakukan tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan selisih atau tunggakan pada laporan bulanan.

Selain koordinasi lapangan, prosedur pengendalian juga diterapkan dalam aspek administrasi melalui penggunaan dokumen bernomor urut tercetak, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan bukti penerimaan. Setiap dokumen memiliki nomor seri yang berurutan untuk menghindari kehilangan atau penyalahgunaan, serta diarsipkan secara fisik maupun digital.

J E M B E R

Dalam tahap pembayaran, diterapkan pula pemisahan fungsi antara petugas penetapan dan petugas penerimaan. Petugas yang menetapkan pajak tidak diperbolehkan menerima pembayaran secara langsung dari wajib pajak, untuk mencegah benturan kepentingan dan menjaga transparansi. Pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui *Virtual Account* Bank Jatim, dan bukti transaksi secara otomatis

¹⁰⁵ Abdurrahman Dzaky, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 September 2025.

terekam dalam sistem sebagai arsip digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa UPT PPD Jember telah menerapkan prosedur pengendalian yang sistematis dan berlapis. Prosedur ini tidak hanya mencegah terjadinya kesalahan pencatatan atau manipulasi data, tetapi juga memastikan setiap transaksi pajak memiliki bukti pendukung yang sah. Dengan adanya pemisahan fungsi dan penomoran dokumen, proses pemungutan pajak menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, prosedur pengendalian yang diterapkan oleh UPT PPD Jember telah memenuhi prinsip dasar pengendalian internal. Adanya sistem verifikasi berlapis, pemisahan tugas, dan dokumentasi yang tertata menjadi bukti bahwa UPT PPD Jember telah membangun mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga keandalan sistem informasi akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan.

d. Pengawasan

Dalam bentuk pemantauan dan evaluasi berkala, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember secara rutin melaksanakan kegiatan audit internal setiap tiga bulan sekali. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pak Faisal, selaku tim lapangan pajak, bahwa pengendalian internal di lingkungan UPT dilakukan oleh tim khusus dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

“Pengendalian internal disini memang ada tim khusus dari pusat, dari badan, itu tiap tiga bulan sekali diadakan pengendalian atau pemeriksaan, audit internal itu seluruh yang diperiksa bukan cuma PAP. Kalau eksternal itu ada tapi kita lebih biasanya sempel ya. Jadi tidak seluruh UPT se-Jatim diperiksa, jadi disempel tujuh UPT

dari 35. Jadi kalau tujuh itu bagus dianggap semua bagus. Itu tidak bisa ditentukan waktunya tapi setiap tahun ada.”¹⁰⁶

Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan Bu Nova, selaku staf tata usaha UPT PPD Jember, yang menambahkan bahwa selain audit internal dari tim pusat, terdapat pula audit dan pelaporan rutin dari kantor badan di Surabaya.

“Auditnya itu dari kantor badan Surabaya itu tiap enam bulan sekali. Kalo laporan triwulan isinya gak tentang AP aja semua yang ada dikantor mulai dari PKB, BBN, PKB, PAP, dan Retribusi sampai penyerapan anggaran bendahara itu. Kalo laporan triwulan itu apa ya, laporan UPT. Pertanggungjawaban UPT selama tiga bulan itu kamu ngapain aja yang kamu capai apa aja, terus dikirim ke Kantor Badan.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan pengendalian internal di UPT PPD Jember dilakukan melalui beberapa mekanisme pengawasan yang terstruktur. Audit internal dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh tim dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, mencakup seluruh jenis pajak daerah yang dikelola oleh UPT, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan retribusi daerah. Selain itu, terdapat audit dari kantor badan setiap enam bulan sekali, serta audit eksternal tahunan yang dilakukan dengan metode *sampling* pada beberapa UPT di Jawa Timur.

Dengan adanya audit berkala dan pelaporan triwulan, sistem pengendalian internal di UPT PPD Jember dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang dilakukan secara rutin ini

¹⁰⁶ Faisal Ridwandi, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Agustus 2025.

¹⁰⁷ Nova Anggraini, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Agustus 2025.

tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prosedur pemungutan pajak, tetapi juga menjadi sarana evaluasi kinerja yang membantu meningkatkan efektivitas serta keandalan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan telah berkontribusi besar terhadap peningkatan disiplin dan tanggung jawab pegawai. Melalui pengawasan bertahap dan evaluasi berkala, setiap potensi kesalahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Selain itu, keterlibatan Bapenda sebagai pengawas eksternal memberikan jaminan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas terhadap hasil pemungutan pajak yang dilaporkan.¹⁰⁸

Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan di UPT PPD Jember telah sesuai dengan prinsip pengendalian internal yang baik. Adanya pengawasan internal yang rutin dan pengawasan eksternal dari Bapenda membentuk sistem pemantauan yang efektif, sehingga mendukung keandalan sistem informasi akuntansi dan menjamin ketertiban dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan.

e. Informasi dan Komunikasi

Pelayanan pajak merupakan suatu aktivitas dengan memberikan jasa pelayanan seperti penyuluhan, bimbingan atau konsultasi mengenai

¹⁰⁸ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 14 Agustus 2025.

perpajakan oleh petugas pajak kepada Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember memberikan berbagai fasilitas kepada wajib pajak sebagai bentuk pelayanan publik dan upaya pembinaan kepatuhan pajak. Salah satu bentuk fasilitas tersebut adalah kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan, baik peraturan yang masih berlaku maupun yang baru ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban mereka, sekaligus memastikan bahwa setiap wajib pajak dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nova, kegiatan sosialisasi yang dilakukan UPT PPD Jember umumnya berkaitan dengan perizinan dan pembaruan izin pemanfaatan air permukaan (AP).

Beliau menjelaskan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KALI HAJI ACHMAD SIDIKI

“Kalau terkait AP itu sosialisasinya ada dua terkait izin, kan Perusahaan yang pake AP itu harus berizinkan, terkait izin kalau dia memang gak pake izin volume yang biasanya katakanlah dia pakainya 1,000 karena dia gak punya izin makanya kita catat 1,500. Biasanya itu kita pertiga bulan sekali kita sosialisasi ke WP kita undang kesini. Kita infokan dari banyaknya obyek yang punyanya Jember itu si A, si B, si C, si D ini mati waktunya perpanjangan gitu. Ngurusnya harus di Surabaya karena termasuk provinsi kan. Terus jangka waktu izin itu cuman tiga tahun, setiap 3 tahun mati.”¹¹⁰

Sama halnya dengan Pak Zaky juga menyampaikan bahwa sosialisasi dilakukan secara rutin baik secara offline maupun online. Beliau menjelaskan:

¹⁰⁹ Observasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, 8 September 2025.

¹¹⁰ Nova Anggraini, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Agustus 2025.

“Ada sosialisasi offline dan online, kalau yang online itu kita via zoom. Untuk sosialisasinya sendiri itu setiap tiga bulan sekali, membahas tentang prosedur perizinan wajib pajak yang sudah mati.”¹¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPD Jember merupakan salah satu langkah penting dalam membina kepatuhan wajib pajak air permukaan. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali ini menjadi sarana komunikasi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak, terutama dalam hal perpanjangan izin pemanfaatan air permukaan. Melalui kegiatan tersebut, wajib pajak memperoleh informasi yang jelas mengenai tata cara, persyaratan, serta jangka waktu perpanjangan izin. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAIJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa UPT PPD Jember telah menjalankan fungsi komunikasi eksternal yang efektif dalam mendukung pengendalian internal. Melalui kegiatan sosialisasi rutin, petugas pajak dapat menyampaikan informasi yang relevan secara langsung kepada wajib pajak, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.¹¹²

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPD Jember dapat dikategorikan sebagai bagian dari penerapan informasi

¹¹¹ Abdurrahman Dzaky, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 September 2025.

¹¹² UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, “Sosialisasi Pajak Air Permukaan,” 8 September 2025.

dan komunikasi dalam sistem pengendalian internal. Upaya ini berperan penting dalam memperkuat transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung kelancaran penerapan sistem informasi akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan.



Gambar 4.12
Sosialisasi *Offline*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Gambar 4.13
Sosialisasi *Online*

C. Pembahasan Temuan JEMBER

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Proses Pemungutan Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

a. Basis Data

Berdasarkan hasil temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember telah menerapkan sistem basis data terintegrasi

dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan guna meningkatkan efektivitas dan akurasi pelaporan pajak daerah. Sistem ini mengelola data wajib pajak, dokumen penetapan, serta laporan penerimaan dalam satu platform digital, sehingga memudahkan proses verifikasi dan pelaporan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Tuovila yang menyatakan bahwa basis data merupakan komponen utama dalam sistem informasi akuntansi yang berfungsi menyimpan data transaksi secara terstruktur dan dapat diolah menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan.¹¹³ Selain itu, Kusuma Indarwati juga menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang dilengkapi basis data memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara efisien, mengurangi risiko kehilangan informasi, serta meningkatkan kecepatan proses pelaporan keuangan.¹¹⁴ Temuan ini menunjukkan bahwa sistem basis data di UPT PPD Jember telah mencerminkan prinsip efisiensi dan akurasi sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu Anna dan Lisnawaty yang menyoroti penerapan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan,¹¹⁵ serta Zulfi Karman dkk. yang mengembangkan sistem pembayaran Pajak Air Permukaan berbasis web guna meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses pelaporan.¹¹⁶ Meskipun demikian, penelitian ini

¹¹³ Anak Agung, *Sistem Informasi*, 103.

¹¹⁴ Kusuma Indawati, *Sistem Informasi*, 94.

¹¹⁵ Anna, “Sistem Informasi.”

¹¹⁶ Zulfi Karman, “Analisis dan Perancangan.”

memiliki keunggulan karena membahas penerapan sistem basis data yang sudah berjalan di instansi pemerintah daerah, bukan hanya rancangan sistemnya.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran basis data dalam sistem informasi akuntansi dengan menempatkannya dalam konteks pelayanan publik daerah. Integrasi antara dokumen digital seperti SKPD, bukti pembayaran, dan rekening koran menjadi bukti bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di UPT PPD Jember telah berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi serta efisiensi pemungutan Pajak Air Permukaan.

b. Perangkat Lunak Akuntansi

Berdasarkan hasil temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember telah menggunakan aplikasi Pajak Air Permukaan sebagai perangkat lunak utama untuk mendukung proses pemungutan pajak. Aplikasi ini berfungsi mencatat dan mengelola data objek pajak, volume pemakaian air, penetapan nilai pajak, serta riwayat pembayaran wajib pajak secara digital. Penggunaan aplikasi internal ini mencerminkan bentuk penerapan sistem *office assessment*, di mana seluruh proses perhitungan dan penetapan pajak dilakukan langsung oleh petugas pajak, bukan oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan perhitungan, meningkatkan efisiensi, serta

meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pelaporan dan pelunasan pajak daerah. Hal ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang menggunakan sistem *self assessment*, di mana wajib pajak mengisi datanya sendiri, sehingga berpotensi mengurangi optimalisasi pemungutan pajak karena adanya kemungkinan perubahan data oleh wajib pajak.

Temuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kusuma Indarwati, bahwa perangkat lunak akuntansi merupakan komponen penting dalam sistem informasi akuntansi yang berperan untuk mengotomatisasi pengolahan data, mempercepat proses pencatatan, serta mengurangi potensi kesalahan manusia (*human error*) dalam pelaporan keuangan.¹¹⁷ Sementara menurut Mulyadi, perangkat lunak dalam sistem akuntansi juga menjadi sarana untuk mendukung fungsi pengendalian dan pelaporan keuangan melalui integrasi data transaksi secara elektronik.¹¹⁸ Dengan demikian, penggunaan aplikasi Pajak Air Permukaan di UPT PPD Jember menunjukkan implementasi teori tersebut, di mana perangkat lunak berperan penting dalam meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keandalan proses administrasi pajak.

Keterkaitan hasil penelitian ini juga terlihat dari penelitian terdahulu oleh Anna dan Lisnawaty yang mengembangkan sistem

¹¹⁷ Kusuma Indawati, *Sistem Informasi*, 45.

¹¹⁸ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 23.

informasi keuangan berbasis web untuk meningkatkan transparansi data keuangan pada sektor swasta.¹¹⁹ Selain itu, penelitian Zulfi Karman dkk. pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi juga menemukan bahwa penggunaan perangkat lunak berbasis web mampu mempercepat proses pelaporan dan meminimalkan kesalahan manusia dalam pengelolaan pajak air permukaan.¹²⁰ Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keunggulan karena meneliti penerapan nyata perangkat lunak internal di lingkungan pemerintahan daerah, bukan hanya merancang sistemnya. Aplikasi yang digunakan di UPT PPD Jember juga memiliki karakteristik berbeda, yakni berbasis intranet (*line connection*) yang lebih aman dan hanya dapat diakses oleh petugas tertentu, sehingga memperkuat aspek keamanan data pajak daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas pemahaman mengenai peran perangkat lunak dalam sistem informasi akuntansi publik. Penerapan aplikasi Pajak Air Permukaan tidak hanya mencerminkan fungsi perangkat lunak sebagai alat bantu operasional, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang menjamin transparansi, keamanan, serta efisiensi dalam pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT PPD Jember.

¹¹⁹ Anna dan Lisnawaty, "Sistem Informasi."

¹²⁰ Zulfi Karman, "Analisis dan Perancangan."

c. Perangkat Keras

Berdasarkan hasil temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember telah memanfaatkan perangkat keras seperti komputer, printer, dan jaringan intranet (*line*) untuk mendukung kelancaran sistem informasi akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan. Setiap petugas pajak memiliki perangkat komputer yang terhubung langsung dengan server utama melalui jaringan intranet, sehingga proses input data, pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan pelaporan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Tuovila yang menyebutkan bahwa perangkat keras merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi akuntansi karena berfungsi sebagai media penginput, pemroses, dan pencetak informasi keuangan yang dibutuhkan organisasi.¹²¹ Begitu pula menurut Kusuma Indarwati, perangkat keras membantu mempercepat proses akuntansi dan mendukung keakuratan data dengan mengintegrasikan fungsi pencatatan dan pelaporan secara elektronik.¹²² Oleh karena itu, penerapan perangkat keras di UPT PPD Jember menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut, di mana seluruh komponen fisik telah digunakan secara optimal untuk menunjang efektivitas sistem informasi akuntansi.

¹²¹ Anak Agung, *Sistem Informasi Akuntansi*, 104.

¹²² Kusuma Indawati, *Sistem Informasi*, 95.

Keterkaitan hasil penelitian ini juga tampak dalam penelitian terdahulu oleh Aini Alwi dkk. yang menyoroti pentingnya infrastruktur teknologi dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi keuangan berbasis komputer pada instansi pemerintahan.¹²³ Namun, perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada konteks penerapan: penelitian Aini Alwi berfokus pada pengembangan sistem di lingkungan universitas, sedangkan penelitian ini menyoroti implementasi nyata perangkat keras pada instansi pemerintah daerah yang mengelola pajak. Dengan begitu, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana perangkat keras mendukung keberhasilan proses administrasi perpajakan di sektor publik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih luas dalam memahami peran perangkat keras sebagai fondasi teknis dari sistem informasi akuntansi. Infrastruktur perangkat keras yang digunakan di UPT PPD Jember tidak hanya memfasilitasi proses input dan pelaporan pajak, tetapi juga memastikan keandalan, keamanan, dan keberlanjutan operasional sistem dalam mendukung pemungutan Pajak Air Permukaan.

d. Prosedur Akuntansi

Berdasarkan hasil temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan

¹²³ Aini Alwi, “Analisis Penerapan.”

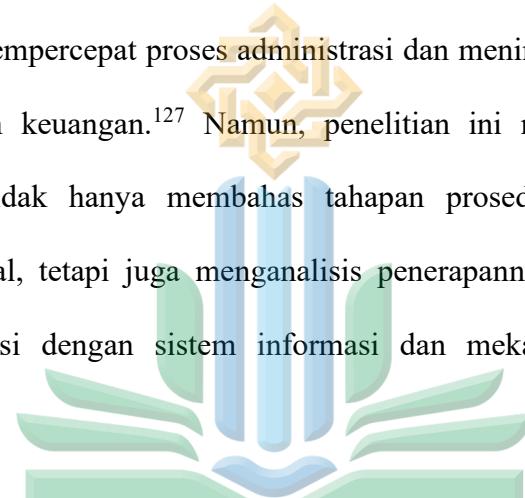
Daerah (PPD) Jember menerapkan prosedur akuntansi yang sistematis dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan. Setiap tahapan, mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penerimaan pembayaran, hingga penyetoran ke kas daerah dilakukan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Prosedur tersebut juga didukung oleh sistem informasi akuntansi yang mengatur alur pencatatan transaksi secara otomatis, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan akurasi data penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyadi yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁴ Selain itu, Kusuma Indarwati juga menjelaskan bahwa keberadaan prosedur akuntansi yang jelas dan terdokumentasi membantu organisasi dalam mengontrol arus data keuangan serta menjaga keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi.¹²⁵ Oleh karena itu, penerapan prosedur akuntansi di UPT PPD Jember menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut, di mana setiap tahapan kegiatan pemungutan pajak telah dijalankan secara terstruktur dan sesuai ketentuan.

¹²⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 5.

¹²⁵ Kusuma Indarwati, *Sistem Informasi*, 99.

Keterkaitan hasil penelitian ini juga terlihat dalam penelitian terdahulu oleh Zesa Riani yang menjelaskan bahwa prosedur akuntansi yang terstruktur dapat meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan akurasi laporan keuangan di lingkungan instansi publik.¹²⁶ Penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Azzah dan Feby yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.¹²⁷ Namun, penelitian ini memiliki keunggulan karena tidak hanya membahas tahapan prosedur akuntansi secara konseptual, tetapi juga menganalisis penerapannya di lapangan yang terintegrasi dengan sistem informasi dan mekanisme pengendalian internal.



Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan di UPT PPD Jember tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem informasi akuntansi yang mendukung ketepatan, akurasi, dan transparansi dalam pemungutan Pajak Air Permukaan.

2. Penerapan Pengendalian Internal Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Untuk Mendukung Sistem Informasi Akuntasi Dalam Proses Pemungutan Pajak Air Permukaan

¹²⁶ Zesa Riani, "Tata Cara."

¹²⁷ Azzah Oktapania, "Pengaruh Sistem."

a. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember memiliki lingkungan pengendalian yang kuat dan terarah. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas antarpegawai, pelaksanaan briefing harian, serta penerapan budaya kerja disiplin dan transparan dalam setiap kegiatan pemungutan Pajak Air Permukaan. Kepala UPT juga melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas staf, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan pajak, untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur. Lingkungan kerja seperti ini mendorong terciptanya rasa tanggung jawab dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari sistem pengendalian internal yang mencakup nilai integritas, etika, komitmen terhadap kompetensi, serta struktur organisasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.¹²⁸ Hal ini diperkuat oleh Mulyadi yang menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian yang baik dapat membentuk perilaku karyawan yang patuh terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, serta menjadi dasar dalam menciptakan sistem

¹²⁸ Anak Agung, *Sistem Informasi*, 110.

informasi akuntansi yang efektif.¹²⁹ Oleh karena itu, penerapan lingkungan pengendalian di UPT PPD Jember menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut, di mana nilai kedisiplinan, transparansi, dan pengawasan berjengang menjadi pondasi utama dalam menjalankan sistem pemungutan pajak yang tertib dan akuntabel.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Henny Marina Hutagalung, yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian yang kuat berperan penting dalam membentuk kepatuhan pegawai terhadap prosedur dan kebijakan organisasi.¹³⁰ Selain itu, penelitian Ferron Tristan Kapojos dkk. juga menemukan bahwa lingkungan pengendalian yang baik mampu mengurangi risiko kesalahan administrasi serta meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi pada lembaga publik.¹³¹ Namun, penelitian ini memiliki keunggulan karena tidak hanya menggambarkan konsep lingkungan pengendalian secara umum, melainkan juga menunjukkan penerapannya secara nyata di instansi pemerintah daerah melalui kegiatan rutin seperti evaluasi, briefing, dan pembagian tugas yang sistematis.

Dengan demikian, lingkungan pengendalian yang diterapkan di UPT PPD Jember dapat dikatakan telah berjalan efektif karena mampu menciptakan budaya kerja yang disiplin, transparan, dan bertanggung

¹²⁹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 180.

¹³⁰ Henny Marina Hutagalung, "Mekanisme Pemungutan."

¹³¹ Ferron Tristan, "Analisis Perhitungan."

jawab. Kondisi ini secara langsung mendukung kinerja sistem informasi akuntansi dan memperkuat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan.

b. Penilaian Resiko

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember telah melakukan proses penilaian risiko secara berkelanjutan dalam setiap kegiatan pemungutan Pajak Air Permukaan. Penilaian ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan keterlambatan pelaporan. Selain itu, petugas juga melakukan evaluasi berkala terhadap faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan tarif pajak dan gangguan teknis pada sistem, yang berpotensi menghambat ketepatan penerimaan pajak.

Penerapan ini sejalan dengan pendapat COSO yang menjelaskan bahwa penilaian risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.¹³² Sementara itu, menurut Mulyadi, penilaian risiko yang dilakukan secara berkala membantu manajemen dalam mengambil keputusan preventif guna meminimalkan potensi kesalahan dan kecurangan dalam proses akuntansi.¹³³ Oleh karena itu, pelaksanaan penilaian risiko di UPT PPD Jember menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut, di mana identifikasi dan

¹³² Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akuntansi*, 86.

¹³³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 181.

evaluasi risiko dilakukan tidak hanya pada aspek teknis sistem, tetapi juga pada perilaku dan tanggung jawab pegawai yang terlibat dalam proses pemungutan pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ferron Tristan Kapojos dkk. yang menyatakan bahwa penilaian risiko yang dilaksanakan secara sistematis mampu meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan keandalan sistem akuntansi pada lembaga publik.¹³⁴ Selain itu, penelitian Henny Marina Hutagalung juga menegaskan bahwa proses penilaian risiko yang dilakukan secara rutin dapat memperkuat sistem pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan administrasi di instansi pemerintahan.¹³⁵ Namun, penelitian ini memiliki keunggulan karena menggambarkan penerapan nyata penilaian risiko dalam konteks pemungutan Pajak Air Permukaan, di mana hasil identifikasi risiko langsung dijadikan dasar dalam pembaruan prosedur kerja dan sistem informasi akuntansi di UPT PPD Jember.

Dengan demikian, penilaian risiko yang diterapkan di UPT PPD Jember berperan penting dalam mendukung efektivitas pengendalian internal serta memastikan bahwa proses pemungutan Pajak Air Permukaan berjalan akurat, transparan, dan sesuai ketentuan.

¹³⁴ Ferron Tristan, “Analisi Perhitungan.”

¹³⁵ Henny Marina Hutagalung, “Mekanisme Pemungutan.”

c. Prosedur Pengendalian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember telah menerapkan berbagai prosedur pengendalian dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan. Prosedur tersebut meliputi sistem otorisasi dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), pemisahan fungsi antara petugas penetapan, penagihan, dan pelaporan, serta penggunaan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran dan laporan penerimaan. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data juga dilakukan secara berlapis melalui sistem informasi akuntansi untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pencatatan maupun manipulasi data.

Penerapan ini sejalan dengan pendapat COSO yang menjelaskan bahwa prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aktivitas yang dirancang untuk memastikan perintah manajemen dilaksanakan dengan tepat serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan.¹³⁶ Sedangkan menurut Mulyadi, pengendalian akuntansi yang efektif melibatkan sistem otorisasi, pemisahan fungsi, dan dokumen pendukung yang memadai sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan.¹³⁷ Oleh karena itu, penerapan prosedur pengendalian di UPT PPD Jember menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut, di mana

¹³⁶ Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akuntansi*, 87.

¹³⁷ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 182.

setiap tahapan pengendalian telah diatur secara jelas dan dilaksanakan dengan disiplin untuk menjaga keandalan sistem informasi akuntansi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferron Tristan Kapojos dkk., yang menyatakan bahwa penerapan prosedur pengendalian internal yang efektif mampu meningkatkan keakuratan pelaporan keuangan serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan administrasi pada lembaga publik.¹³⁸ Selain itu, penelitian Zulfi Karman dkk. juga menegaskan pentingnya sistem validasi dan otorisasi berlapis dalam mencegah kesalahan input data pada sistem pembayaran pajak berbasis web.¹³⁹ Namun, penelitian ini memiliki keunggulan karena membahas implementasi langsung prosedur pengendalian dalam konteks pemerintahan daerah, di mana proses kontrol dilakukan secara terintegrasi antara pengawasan manual dan sistem elektronik menggunakan aplikasi Pajak Air Permukaan.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa prosedur pengendalian yang diterapkan di UPT PPD Jember tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga keandalan dan integritas data keuangan. Pelaksanaan prosedur yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik turut memastikan proses pemungutan Pajak Air Permukaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

¹³⁸ Ferron Tristan, “Analisi Perhitungan.”

¹³⁹ Zulfi Karman, “Analisis dan Perancangan”

d. Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember melaksanakan kegiatan pengawasan secara rutin dan berjenjang untuk memastikan seluruh proses pemungutan Pajak Air Permukaan berjalan sesuai ketentuan. Bentuk pengawasan tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan briefing harian, audit triwulan, serta pemeriksaan laporan penerimaan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. Selain itu, UPT juga menerima pengawasan dari pihak eksternal seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk monitoring atas kinerja unit pelaksana di daerah. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menekankan pada proses kerja pegawai dan kesesuaian dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Penerapan ini sejalan dengan pendapat COSO yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk menilai kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur dijalankan secara konsisten.¹⁴⁰ Sedangkan menurut Mulyadi, pengawasan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem akuntansi dan mendeteksi sedini mungkin adanya penyimpangan agar

¹⁴⁰ Kusuma Indawati, *Sistem Informasi*, 118.

dapat segera diambil tindakan korektif.¹⁴¹ Oleh karena itu, sistem pengawasan yang diterapkan di UPT PPD Jember telah sesuai dengan teori tersebut, karena mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja pegawai, pemeriksaan dokumen pendukung, serta tindak lanjut terhadap setiap kendala yang ditemukan di lapangan.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfi Karman dkk., yang menekankan pentingnya proses monitoring berkelanjutan untuk menjaga keakuratan data dan mencegah kesalahan dalam sistem informasi pajak berbasis web.¹⁴² Selain itu, penelitian Tania Aprilia Ropah dkk. juga menyatakan bahwa kegiatan pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan terjadinya kesalahan administratif dalam pelaporan pajak daerah.¹⁴³ Namun, penelitian ini memiliki keunggulan karena menyoroti pelaksanaan pengawasan secara langsung di lingkungan pemerintahan daerah, yang dilakukan melalui kombinasi antara pengawasan internal harian dan audit berkala oleh pihak eksternal, sehingga hasilnya lebih komprehensif dalam mendukung efektivitas sistem informasi akuntansi.

Dengan demikian, kegiatan pengawasan di UPT PPD Jember tidak hanya menjadi fungsi kontrol, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan keandalan sistem informasi akuntansi.

¹⁴¹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 184.

¹⁴² Zulfi Karman, “Analisis dan Perancangan.”

¹⁴³ Tania Aprilia, “Evaluasi Penerapan.”

Pengawasan yang berkelanjutan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga ketertiban pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi dan efisiensi.

e. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang efektif untuk mendukung kelancaran proses pemungutan Pajak Air Permukaan. Komunikasi dilakukan secara dua arah antara kepala UPT dengan seluruh pegawai melalui kegiatan briefing harian, rapat evaluasi mingguan, serta pelaporan digital yang disampaikan melalui sistem aplikasi pajak daerah. Selain itu, koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur guna memastikan pelaporan pendapatan daerah berjalan transparan dan tepat waktu. Dalam bentuk komunikasi ekternal juga UPT PPD Jember rutin melakukan sosialisasi kepada wajib pajak air permukaan setiap tiga bulan sekali.

Hal ini sejalan dengan pendapat COSO yang menyatakan bahwa informasi dan komunikasi merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang memastikan seluruh pihak terkait memperoleh informasi yang tepat waktu dan akurat untuk mendukung

pelaksanaan tanggung jawabnya.¹⁴⁴ Selain itu, menurut Mulyadi, komunikasi yang efektif membantu organisasi menyampaikan informasi penting kepada pihak internal maupun eksternal guna mendukung proses pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.¹⁴⁵ Oleh karena itu, penerapan sistem informasi dan komunikasi di UPT PPD Jember menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut, di mana arus informasi disampaikan secara terbuka, terstruktur, dan tepat waktu agar seluruh kegiatan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aini Alwi dkk., yang menyatakan bahwa komunikasi internal yang efektif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja sistem informasi akuntansi di instansi pemerintahan.¹⁴⁶ Sementara penelitian Zesa Riani menegaskan bahwa sistem komunikasi yang terintegrasi dalam sistem informasi akuntansi mampu mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data keuangan.¹⁴⁷ Namun, penelitian ini memiliki keunggulan karena menyoroti implementasi nyata komunikasi vertikal dan horizontal di lingkungan instansi pajak daerah, di mana koordinasi langsung antara pimpinan, pegawai, wajib pajak dan pihak provinsi dilakukan secara rutin melalui sistem elektronik dan tatap muka.

¹⁴⁴ Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akuntansi*, 89.

¹⁴⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 184.

¹⁴⁶ Aini Alwi dkk., “Analisis Penerapan.”

¹⁴⁷ Zesa Riani, “Tata Cara.”

Dengan demikian, penerapan informasi dan komunikasi di UPT PPD Jember tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan data, tetapi juga menjadi sarana membangun transparansi dan kolaborasi antarbagian. Sistem komunikasi yang terbuka dan terintegrasi ini berperan penting dalam memastikan efektivitas sistem informasi akuntansi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “**Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember**”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember telah berjalan secara efektif dan terintegrasi. Hal ini tercermin melalui penggunaan aplikasi Pajak Air Permukaan yang mampu mengelola data wajib pajak, penetapan, pembayaran, serta pelaporan secara digital dan real time. Sistem tersebut menjamin keakuratan data, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Dengan demikian, penerapan Sistem Informasi Akuntansi telah berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi kinerja pemungutan Pajak Air Permukaan serta mendukung pencapaian target penerimaan yang optimal.
2. Penerapan pengendalian internal di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember juga telah dilaksanakan dengan baik untuk mendukung keberhasilan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan. Hal ini ditunjukkan melalui adanya pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan prosedur kerja yang terstandar, pengawasan berjenjang

oleh pimpinan, serta kegiatan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai. Pengendalian internal tersebut memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan, mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan, serta menjamin keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem. Dengan demikian, sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas, akuntabilitas, dan keandalan sistem informasi akuntansi dalam mendukung proses pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

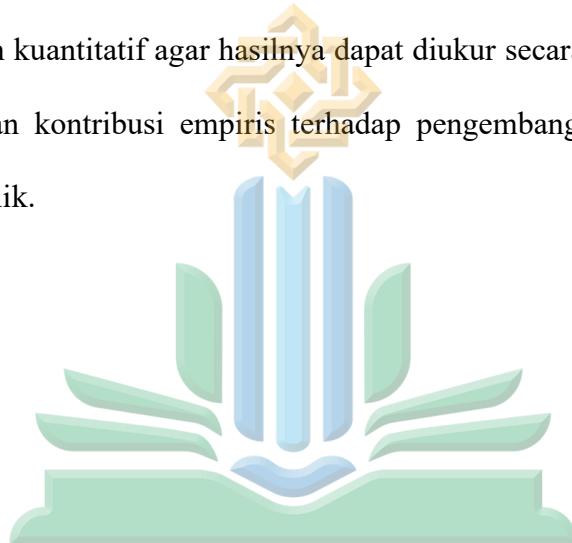
B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

1. Bagi UPT PPD Jember, disarankan perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkala mengenai tata kelola keuangan daerah dan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, guna meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja.
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperluas penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal di seluruh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di kabupaten/kota lainnya. Dengan adanya standarisasi sistem informasi dan tata kelola pengendalian internal yang seragam, efektivitas pemungutan Pajak Air

Permukaan dapat meningkat secara menyeluruh serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti efektivitas pelaporan, kepatuhan wajib pajak, atau dampak implementasi sistem terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif agar hasilnya dapat diukur secara lebih objektif dan memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Aini, Hendrik Gamaliel, dan Sintje Rondonuwu. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan Pada CV Aneka Ritelindo Manado." *Jurnal EMBA* Vol. 11, no. 1 (2023): 281–91.

Anna, dan Lisnawaty. "Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Keuangan Berbasis Web Pada CV. Damar Abadi." *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi* Vol. 5, no. 1 (2024): 67–78. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/justian>.

Ariana, Anak Agung Gede Bagus, Khas Sukma Mulya, I Kadek Dwi Gandika Supartha, dkk. *Sistem Informasi Akuntansi: Pengantar & Penerapan SIA Berbagai Sektor*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Endaryati, Eni. *Sistem Informasi Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.

Halim, Kusuma Indawati. *Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Terhadap Proses Bisnis*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2022.

Hutagalung, Henny Marina. "Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi." Skripsi, Universitas Jambi, 2021.

Kalumata, Novita, Grace B. Nangoi, dan Robert Lambey. "Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Malalayang Manado." *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 12, no. 2 (2017): 1205–15. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18650.2017>.

Kapojos, Ferron Tristan, Inggriani Elim, dan Steven J Tangkuman. "Analisi Perhitungan, Penetapan dan Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah Di Minahasa." *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 17, no. 4 (2022): 247–58.

Karman, Zulfi. "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Berbasis Web." *Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer* Vol. 4, no. 3 (2023): 1860–68. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i3.1443>.

Kharisma, Wiwik, M Abdul Aziz, Ahmad Syamsul Anwar, dan Devi Hardianti Rukmana. "Implementasi Aplikasi 'SAKTI' Sebagai Sistem Informasi Akuntansi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi."

Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.20>.

Klikpajak. Pajak Air Permukaan Bagi Perusahaan: Pengertian, Tarif, dan Perhitungan. Diakses 5 Mei 2025. <https://klikpajak.id/blog/pajak-air-permukaan-bagi-perusahaan>.

Listiani, Wulan Saputri, Jiwa Pribadi Agustianto, dan Raden Kusyeni. "Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BAPENDA Cikokol Tahun 2019-202." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 2, no. 5 (2022).

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi, 2023.

Mauliyah, Nur Ika, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, dan Luluk Nur Khotimah. "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 1, no. 1 (2023). <http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/109>.

Mauliyah, Nur Ika, Siti Lailatul Maulida, Alfa Syah Barra Afsil Mubarok, dan Imelda Aprilia. "Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan Melalui Sosialisasi Perpajakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan* Vol. 2, no. 2 (2024).

Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Oktapania, Azzah, dan Feby Tri Falia. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi* Vol. 04, no. 01 (2024): 23–33. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika>.

Peraturan Bupati Jember. Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Bapenda.

Peraturan Gubernur Jawa Timur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Qur'an Kemenag. Surah An Nisa' Ayat 58. Diakses 24 Oktober 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Rahman, Andi, Nurul Fadhilah, dan Nur Ika Mauliyah. "Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Surabaya Barat Dengan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* Vol. 3, no. 1 (2025). <https://dx.doi.org/10.61930/jurnaladm>.

Rahmiyati, Dwinita. "Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau." Skripsi, STIE Tanjungpinang, 2022.

Ramadhan, Akbar Syamil, dan Juliana Nasution. "Efektifitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi* Vol. 11, no. 1 (2022): 01–10. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v1i1.55196>.

Riani, Zesa. "Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) Pada UPTD Wilayah 1 BAPENDA Provinsi Lampung." Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Ropah, Tania Aprilia, Stanly W Alexander, dan Syermi S E Mintalangi. "Evaluasi Penerapan Perhitungan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada PT Air Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 16, no. 3 (2021): 217–26.

Rumboirusy, Marthen Luther, dan Darius Sabon Rain. "Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Mimika." *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 6 (2024): 622–36.

Rumondor, Megawati Sherlina, Treesje Runtu, dan I Gede Suwetja. "Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel Untuk Pengendalian Intern di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol. 8, no. 3 (2024): 490–98.

Septiana, Aulia, Erwinda Sam Anafih, dan Terrenzia Sekar Pamastutiningtyas. "SIA : Implementasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pajak Daerah." *Journal of Sustainability and Science Economics* Vol. 2, no. 1 (2024): 27–38. <https://doi.org/10.62337/jsse.v2i1.16>.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Taroreh, Eric Ignatius, Treesje Runtu, dan Syermi S. E. Mintalangi. "Analisis Pengenaan Tarif dan Perhitungan Pajak Air Permukaan Pada Wajib Pajak Berdasarkan Perda Sulut Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)." *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* Vol. 2, no. 2 (2024): 414–20. <https://doi.org/10.58784/rapi.219>.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember	1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 2. Pengendalian Internal	1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 2. Pengendalian Internal 3. Pajak Air Permukaan	1. Data primer: staf seksi pendapatan, staf tata usaha, tim lapangan 2. Data sekunder: observasi, wawancara, dokumentasi	1. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Teknik Pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Keabsahan data menggunakan: a. Triangulasi metode	1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember? 2. Bagaimana penerapan pengendalian internal di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember untuk mendukung Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pemungutan Pajak Air Permukaan?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan berikut merupakan pertanyaan yang diajukan ke informan UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember:

1. Tentang Sistem Informasi Akuntansi
 - a. Bagaimana sistem penyimpanan, pencatatan, dan keamanan data Wajib Pajak serta transaksi Pajak Air Permukaan?
 - b. Aplikasi atau sistem apa yang digunakan serta pelaporan apa saja yang dihasilkan?
 - c. Perangkat keras apa saja yang digunakan dan perawatannya bagaimana?
 - d. Bagaimana proses pembayaran pajak air permukaan dari perdaftaran Wajib Pajak?
 - e. Bagaimana peran Sistem Informasi Akuntansi dalam pemungutan Pajak Air Permukaan?
2. Tentang Pengendalian Internal
 - a. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember?
 - b. Risiko apasaja yang sering dihadapi saat pemungutan pajak air permukaan dan cara mengatasinya?
 - c. Kebijakan atau prosedur apa saja yang diterapkan petugas pajak dalam mendukung keteraturan dan akurasi pelaksanaan pemungutan pajak?
 - d. Kebijakan apa yang diterapkan agar tidak ada kesalahan/penyimpangan?

- e. Fasilitas apa saja yang didapatkan wajib pajak air permukaan dan apakah ada agenda khusus untuk menambah pemahaman wajib pajak terkait pajak air permukaan?
- f. Bagaimana peran pengendalian internal dalam pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	12 Juni 2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember	
2.	13 Juni 2025	Menerima surat persetujuan izin penelitian di UPT PPD Jember, pra-wawancara, observasi dan penelitian	
3.	14 Agustus 2025	Melaksanakan wawancara dengan Kepala kasi pembayaran dan penagihan	
4.	19 Agustus 2025	Melaksanakan wawancara dengan staf tata usaha bagian penerimaan pajak air permukaan	
5.	8 September 2025	Melaksanakan wawancara dengan staf kasi pendapatan dan penetapan	
6.	5 November 2025	Menerima surat selesai penelitian di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember	

Jember, 5 November 2025

Kepala Kasi Pembayaran dan
Penagihan Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pendapatan Daerah



Faisal Ridwandi, S.E, M.M
NIP. 197907042010011003

DOKUMENTASI



Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember



Wawancara dengan Bapak Faisal Ridwandi, S.E, M.M selaku tim lapangan
penagihan pajak air permukaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Ibu Nova Anggraini, A.Md selaku staf tata usaha yang
mengelola admininstrasi penerimaan pajak air permukaan



Wawancara dengan Bapak Zaki. selaku staf seksi pendataan dan penetapan pajak air permukaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Observasi lokasi sumber wajib pajak air permukaan oleh petugas pajak dan tim PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air)

Data rincian pemakaian air permukaan wajib pajak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-907/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Juni 2025

Kepada Yth.

Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
 Jl. Teratai No. 10-11, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Kharisma Candrining Pangastuti
NIM : 214105030044
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R**



Nurul Widyawati Islami Rahayu



1



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER
Jalan. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300

Jember, 13 Juni 2025

Nomor : 000.1/3543/202.629/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Jember
 di
 Jember


 Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Jember Nomor B-907/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2025
 tanggal 12 Juni 2025 perihal sebagaimana pokok surat dimaksud, maka
 bersama ini kami sampaikan mahasiswa berikut :

NO	Nomor Induk Mahasiswa	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	214105030044	Kharisma Candraning Pangastuti	Akuntansi Syariah

Di ijinkan untuk mengadakan penelitian pada Kantor UPT. Pengelolaan
 Pendapatan Daerah Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

J E M B E R KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 JEMBER


ISMAWAN TARAMURTIS.H., M.M.
 Pembina Tingkat I/IV-b
 NIP. 196910191994031004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER
 Jl. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300 e-mail uptbpdjember@gmail.com
JEMBER, 68133

Jember, 4 November 2025

Nomor : 800/7096/202.629/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Hasil Penelitian
Mahasiswa

Kepada
 Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Islam
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji
 Achmad Siddiq
 di
JEMBER

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
 Siddiq Jember Nomor : B-907/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2025 tanggal 12
 Juni 2025 perihal sebagaimana pokok surat dimaksud, maka bersama ini
 kami sampaikan mahasiswa berikut :

Nama : Kharisma Candraning Pangastuti

NIM. : 214105030044

Program Studi : Akuntansi Syariah

Telah melaksanakan penelitian pada Kantor UPT Pengelolaan
 Pendapatan Daerah Jember.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis
 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Jember,



Ismawan Taramurti, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I (VI-b)
 NIP 196910191994031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Kharisma Candraning Pangastuti
 NIM : 214105030044
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN
 PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN
 PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT. PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember 5 November 2025

Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfah, MEI.

NIP. 197709142005012004



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang pertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kharisma Candraning Pangastuti
 NIM : 214105030044
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”** adalah hasil karya orisional saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dan disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
 J E M B Saya yang menyatakan
 Jember, 5 November 2025



Kharisma Candraning Pangastuti
 NIM. 214105030044

BIODATA PENULIS



Nama	:	Kharisma Candraning Pangastuti
NIM	:	214105030044
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pasuruan, 20 Agustus 2003
Alamat	:	Dsn. Pager Wetan, Ds. Pager, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Jurusan/Program Studi	:	Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Email	:	cipee.digital@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Pager 1 (2009-2015)
2. MTs. KHA. Wahid Hasyim Bangil (2015-2018)
3. MA. KHA. Wahid Hasyim Bangil (2018-2021)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi

HMPS Akuntansi Syariah Periode 2023-2024